

**ANALISIS PENGARUH PENDIDIKAN, UPAH MINIMUM,
PENGANGGURAN, DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**



Oleh:

Nama : Fatikah Desi Anggreni
Nomor Mahasiswa : 20313252
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

2025

**Analisis Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum, Pengangguran, Dan Indeks
Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Daerah Istimewa
Yogyakarta**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir

guna memperoleh gelar Sarjana jenjang strata 1

Program Studi Ilmu Ekonomi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Fatikah Desi Anggreni

Nomor Mahasiswa : 20313252

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

YOGYAKARTA

2025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti yang dimaksud dalam buku pedoman skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Februari 2025

Penulis,

 
Fatimah Desi Anggreni

HALAMAN PENGESAHAN

Analisis Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum, Pengangguran, Dan Indeks
Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Daerah Istimewa
Yogyakarta

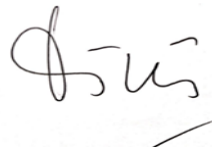
Oleh:

Nama : Fatikah Desi Anggreni
Nomor Mahasiswa : 20313252
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 20 Februari 2025

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen pembimbing



Diana Wijayanti, S.E., M.Si.

BERITA ACARA

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS PENGARUH PENDIDIKAN, UPAH MINIMUM, PENGANGGURAN, DAN INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

Disusun oleh : FATIKAH DESI ANGGRAENI

Nomor Mahasiswa : 20313252

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Senin, 10 Maret 2025

Penguji/Pembimbing Skripsi : Dra. Diana Wijayanti, M.Si.

Penguji : Dr. Rokhedi Priyo Santoso, SE., MIDEc.

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

Al-Insyirah [94]: 6

“The roots of education are bitter, but the fruit is sweet.”

Aristotle

"Do not wait for the perfect time. Take the time and make it perfect."

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan ridhonya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta Bapak Sutejo dan Ibu Daryati, adik tercinta Alyasyifa dan Almaira atas doa dan dukungannya tiada henti yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan studi dan tugas akhir ini

Dan kepada Zahid Nur Ardian selaku orang spesial yang telah mendampingi dan memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Terimakasih atas segala dukungan yang telah diberikan dari keluarga besar penulis, bapak dan ibu dosen, serta teman-teman penulis yang selalu memberikan dukungan, doa, semangat yang diberikan sehingga penulis bisa sampai pada titik ini.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan ridhonya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum, Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta” sebagai syarat menyelesaikan Pendidikan Sarjana (S-1) pada program studi Ekonomi Pembangunan di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Tidak lupa, shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi agung Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya pada Hari Akhir.

Penyelesaian penulisan skripsi ini tak lepas dari doa, bimbingan, nasehat, dan bantuannya dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan Kesehatan, kelancaran, dan kemudahan kepada penulis selama menulis skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Yth. Bapak Johan Arifin, S.E., M..Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia
3. Yth. Bapak Abdul Hakim., S.E., M.Ec., Ph.D selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia
4. Ibu Diana Wijayanti, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Yth. Bapak Prof. Dr. Drs. Nur Feriyanto M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan pendampingan selama menempuh kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini.

6. Seluruh bapak/ibu dosen Program studi Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan pengajaran dan bimbingan selama penulis menuntut ilmu di fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
7. Kedua orang tua tercinta penulis, Bapak Sutejo dan Ibu Daryati atas doa dan dukungannya tiada henti yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Adik tercinta Alyasyifa dan Almaira yang selalu memberikan doa dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Untuk Zahid Nur Ardian selaku orang spesial yang telah mendampingi dan memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini
10. Untuk penulis Putri Kawasaki, Sekar, Devita Salsabilla, Fadella, Nanda Putri, Chelsi selaku teman dekat penulis yang telah memberi dukungan dan motivasi secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Untuk diri saya sendiri Fatikah Desi Anggraeni terimakasih untuk pencapaiannya hingga difase ini. Terimakasih karena terus berusaha dan memilih untuk tidak menyerah.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap sarn, kritik dan masukan yang membangun untuk pembelajaran bagi penulis maupun pembaca umum. Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca umum penulis sendiri maupun pembaca umum.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Yogyakarta, 20 Februari 2025

Penulis,

Fatikah Desi Anggreni

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
BERITA ACARA.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	10
2.1 Kajian Pustaka.....	10
2.2 Landasan Teori.....	14
2.2.1 Kemiskinan.....	14
2.2.2 Pendidikan	18
2.2.3 Upah Minimum	20
2.2.4 Pengangguran.....	21
2.2.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	22
2.3 Hubungan Antara Variabel Dependen dengan Variabel Independen	25
2.3.1 Hubungan Antara Kemiskinan dengan Pendidikan	25
2.3.2 Hubungan Antara Kemiskinan dengan Upah Minimum	26
2.3.3 Hubungan Antara Kemiskinan dengan Tingkat Pengangguran ..	26

2.3.4	Hubungan Antara Kemiskinan dengan Indeks Pembangunan Manusia	27
2.4	Kerangka Pemikiran	28
2.5	Hipotesis Penelitian	28
BAB III	METODE PENELITIAN	29
3.1	Jenis dan sumber data	29
3.2	Data Operasional Variabel	29
3.3	Metode Analisis	31
3.3.1	<i>Common Effect Model</i> (CEM)	31
3.3.2	<i>Fixed Effect Model</i> (FEM)	32
3.3.3	<i>Random Effect Model</i> (REM)	32
3.4	Pemilihan Metode Estimasi Regresi Data Panel	32
3.4.1	Uji Chow	33
3.4.2	Uji Hausman	33
3.4.3	Uji Lagrange Multiplier (LM)	34
3.5	Uji Signifikansi	34
3.5.1	Koefisien Determinasi (R^2)	34
3.5.2	Uji Simultan (Uji F)	34
3.5.3	Uji Parsial (Uji t)	35
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	37
4.1	Statistik Deskriptif	37
4.2	Hasil Analisis dan Pembahasan	39
4.2.1	Common Effect Model	39
4.2.2	Fixed Effect Model	40
4.2.3	Random Effect Model	41
4.3	Pemilihan Model Terbaik	41
4.3.1	Uji Chow	41
4.3.2	Uji Hausman	42
4.3.3	Uji LM (Lagrange Multiplier)	42
4.4	Interpretasi Model Terbaik	43
4.5	Pengujian Hipotesis	43
4.5.1	Koefisien Determinasi (R^2)	43

4.5.2	Uji Kelayakan Model (Uji F).....	44
4.5.3	Uji Signifikansi Variabel Independen (Uji t).....	44
4.6	Pembahasan.....	45
4.6.1	Pengaruh Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan.....	45
4.6.2	Pengaruh Upah Minimum Kabupaten terhadap Tingkat Kemiskinan.....	46
4.6.3	Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan.....	46
4.6.4	Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan.....	47
BAB V	SIMPULAN DAN IMPLIKASI.....	49
5.1	Simpulan.....	49
5.2	Implikasi.....	50
	DAFTAR PUSTAKA.....	52
	LAMPIRAN.....	55

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Definisi Variabel	30
Tabel 4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	37
Tabel 4.2 Hasil Estimasi <i>Common Effect Model</i>	40
Tabel 4.3 Hasil Estimasi <i>Fixed Effect Model</i>	40
Tabel 4.4 Hasil Estimasi <i>Random Effect Model</i>	41
Tabel 4.5 Hasil Uji Chow	41
Tabel 4.6 Hasil Uji Hausman	42
Tabel 4.7 Hasil Uji LM(Lagrange Multiplier)	42
Tabel 4.8 Regresi Data Panel Model Terbaik : Fixed Effect Model	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tingkat Kemiskinan di Indonesia 2013-2023	2
Gambar 1.2 Tingkat Kemiskinan Provinsi D.I.Yogyakarta Tahun 2017-2023.....	4
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	28

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Kemiskinan, Penduduk Lulusan SMA ke Atas, Upah Minimum Kabupaten/Kota, Jumlah Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia.....	55
Lampiran 2	57
Lampiran 3	60

ABSTRAK

Kemiskinan masih menjadi isu penting di hampir semua negara, termasuk Indonesia. Pengentasan kemiskinan tetap menjadi tema utama pembangunan yang berkelanjutan, baik di tingkat global maupun nasional. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), ukuran kemiskinan diukur berdasarkan dua komponen utama, yaitu konsumsi makanan dan konsumsi non-makanan. Untuk konsumsi makanan, BPS menggunakan patokan sebesar 2.100 kalori per orang per hari, yang diambil dari 52 jenis komoditas makanan yang dianggap mewakili pola konsumsi penduduk lapisan bawah. Sementara untuk konsumsi non-makanan, ditentukan dari 45 jenis komoditas yang relevan sesuai dengan kesepakatan nasional, tanpa membedakan antara wilayah pedesaan dan perkotaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi kemiskinan di DIY dengan variabel independen yang digunakan adalah tingkat pendidikan dengan menggunakan data presentase penduduk berusia 15 tahun menurut ijazah tertinggi SLTA, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), tingkat pengangguran, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapatkan melalui website Badan Pusat Statistik (BPS). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan regresi data panel dengan penggunaan data time series dan cross section di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan pengangguran tidak signifikan, yang artinya bahwa kedua variabel tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. Sedangkan untuk variabel upah minimum Kabupaten/Kota dan indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan yang artinya variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di DIY.

Kata kunci: Kemiskinan, Pendidikan, Upah Minimum Kabupaten/Kota, Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia.

BAB I

PENDAHULUAN

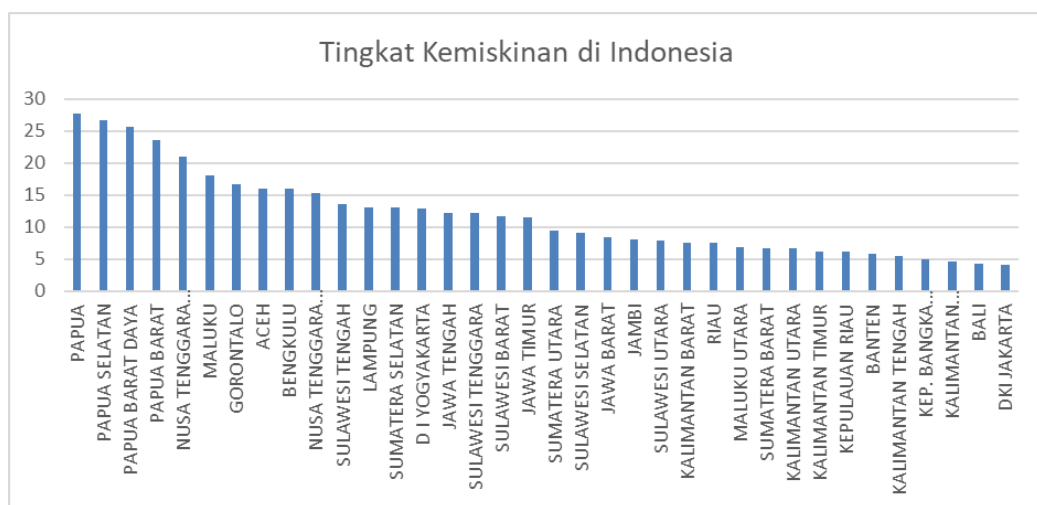
1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga menjadi prioritas pembangunan. Kemiskinan masih menjadi isu penting di hampir semua negara, termasuk Indonesia. Pengentasan kemiskinan tetap menjadi tema utama pembangunan yang berkelanjutan, baik di tingkat global maupun nasional. Dalam *Outcome Document Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, penghapusan kemiskinan ditetapkan sebagai tujuan pertama dari tujuh belas tujuan yang disepakati dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Hal ini menunjukkan komitmen global untuk mengatasi kemiskinan sebagai prioritas dalam agenda pembangunan yang berkelanjutan. Sejalan dengan komitmen global tersebut, Indonesia, melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, juga menetapkan strategi pengurangan tingkat kemiskinan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional yang utama.

Aspek kehidupan seperti ekonomi, politik dan sosial, erat kaitannya dengan kemiskinan. Orang yang lahir dengan kondisi miskin, akan sulit mendapatkan kebutuhan dasar untuk keberlanjutan hidup seperti kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja. Laporan World Bank (2020), pada “Proverty and Shared Prosperity” menyatakan bahwa kemajuan ekonomi dapat terhambat karena adanya kemiskinan. Hal ini menjadikan individu yang berada pada garis kemiskinan, akan berpotensi untuk mendapatkan produktivitas rendah, yang berdampak pada lambatnya pertumbuhan ekonomi.

Banyak sekali faktor yang menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan sumber daya alam yang melimpah dan tanah yang subur. Namun sebagian besar penduduk masih hidup dalam garis kemiskinan. Teori dari Nurkse tahun 1953 tentang lingkaran setan kemiskinan menjelaskan esensi penyebab kemiskinan diantaranya adalah keterbelakangan sumber daya manusia yang dapat dilihat dari data statistik indeks pembangunan manusia. hal ini menyebabkan produktivitas manusia yang rendah. Selanjutnya adanya kelemahan

pasar, dan kurangnya modal untuk manusia bekerja. Indikasi rendahnya pendapatan yang dilihat dari PDRB per kapita menjadi akibat rendahnya produktivitas. Investasi dan tabungan yang rendah, dapat menjadikan pendapatan yang rendah. Rendahnya akumulasi modal dari investasi, menyebabkan kurangnya ketersediaan lapangan kerja yang dapat dilihat dari tingginya tingkat pengangguran. Akar penyebab dari rendahnya akumulasi modal adalah keterbelakangan yang termasuk salah satu dari faktor-faktor penyebab lainnya (Rasnadanti, 2024)



Sumber : Badan Pusat Statistik, (2025).

Gambar 1.1

Tingkat Kemiskinan di Indonesia 2013-2023

Gambar 1.1 merupakan statistik tingkat kemiskinan di Indonesia tiap Provinsi. Provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi ada di Provinsi Papua dengan presentase tingkat kemiskinan sebesar 27,72%, Papua Selatan dengan presentase 26,70%, dan Papua Barat Daya dengan presentase tingkat kemiskinan sebesar 25,68%. Sedangkan, provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah ada di Provinsi DKI Jakarta dengan presentase 4,06%, Bali dengan 4,31%, serta Kalimantan Selatan memiliki presentase tingkat kemiskinan sebesar 4,65%. Dari gambar di atas dapat dilihat, kesenjangan tingkat kemiskinan tertinggi dan terendah, memiliki selisih lebih dari 20%. Artinya, tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia masih belum merata dan masih banyak penduduk dengan kategori miskin.

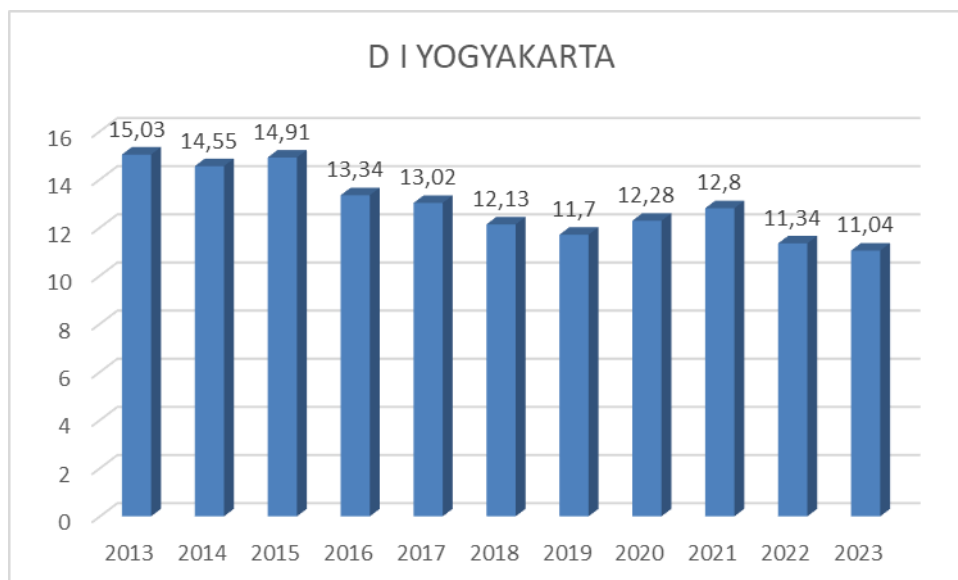
Pada gambar 1.1, dapat dilihat bahwasannya DIY termasuk dalam Provinsi dengan presentase tingkat kemiskinan yang tinggi dengan menduduki posisi ke 14 dari 38 Provinsi di Indonesia. Menurut (Badan Pusat Statistik, 2024) Permasalahan kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih menjadi isu penting dalam pembangunan daerah. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2024, tingkat kemiskinan di DIY tercatat sebesar 10,83%, mengalami penurunan dari 11,04% pada Maret 2023. Namun, DIY masih memiliki tingkat kemiskinan tertinggi dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa. Sebaran kemiskinan di DIY menunjukkan bahwa kawasan perdesaan memiliki persentase lebih tinggi dibandingkan kawasan perkotaan, yaitu 12,49% dibandingkan 10,29%. Faktor yang berkontribusi meliputi keterbatasan lapangan kerja, rendahnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta ketimpangan ekonomi. Dengan adanya fenomena ini peneliti memilih daerah di Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai lokasi penelitian.

Sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I. Yogyakarta) telah merumuskan strategi pembangunan regional dengan fokus pada wilayah pesisir selatan sebagai prioritas utama. Hal ini dilakukan berdasarkan analisis yang menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di wilayah selatan, terutama di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul, masih lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah utara seperti Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022 mengonfirmasi bahwa tingkat kemiskinan di wilayah selatan D.I. Yogyakarta secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah utara. Selain itu, data historis dari BPS sejak 2014 hingga 2022 menunjukkan bahwa persentase kemiskinan di D.I. Yogyakarta secara konsisten menjadi yang tertinggi di Pulau Jawa.

Selain tantangan kemiskinan yang lebih tinggi, wilayah selatan D.I. Yogyakarta juga memiliki potensi sumber daya alam yang hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal. Potensi ini diharapkan dapat menjadi pendorong utama percepatan pembangunan ekonomi di wilayah tersebut, sekaligus menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Dengan memaksimalkan pemanfaatan potensi alam yang ada, diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah selatan dapat meningkat secara signifikan. Optimalisasi sumber

daya ini juga diharapkan akan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi antara wilayah utara dan selatan di D.I. Yogyakarta, serta berkontribusi pada pencapaian target-target pembangunan nasional yang lebih inklusif dan berkeadilan (Badan Pusat Statistik, 2023b).

Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar baik untuk makanan maupun non-makanan, yang diukur berdasarkan garis kemiskinan dengan mencakup kedua kategori tersebut. Individu dianggap miskin jika pengeluaran rata-rata per kapita per bulan mereka berada di bawah garis kemiskinan. Pengukuran kemiskinan ini diharapkan dapat menjadi alat yang efektif bagi pembuat kebijakan untuk memusatkan perhatian pada kondisi hidup masyarakat yang miskin. Terlebih lagi, dalam konteks ekonomi Indonesia yang terdampak oleh pandemi COVID-19, pengukuran ini menjadi semakin relevan untuk menilai dampak langsung maupun tidak langsung terhadap kesejahteraan penduduk (Badan Pusat Statistik, 2021a). Data mengenai kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2013-2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Sumber : Badan Pusat Statistik, (2024).

Gambar 1.2
Tingkat Kemiskinan Provinsi D.I.Yogyakarta Tahun 2017-2023

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) selama periode 2013–2023, terdapat fluktuasi yang mencerminkan dinamika kemiskinan di wilayah tersebut. Dari gambar 1.2, kenaikan tingkat kemiskinan terjadi pada tahun 2014 ke 2015 dengan kenaikan sebesar 0,36 persen. Secara keseluruhan, tingkat kemiskinan yang terjadi pada tahun 2013-2023 lebih banyak mengalami penurunan. Jika tingkat kemiskinan menunjukkan tren penurunan, mengindikasikan keberhasilan pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan sebelum adanya pandemi. Kemudian, pada 2020 dan 2021, terjadi peningkatan pada kemiskinan yang disebabkan oleh dampak negatif pandemi COVID-19 terhadap sektor-sektor utama di DIY, seperti pariwisata dan industri kreatif. Pembatasan ekonomi dan sosial selama pandemi turut memperburuk kondisi kemiskinan di wilayah ini. Memasuki periode akhir, yakni tahun 2022 hingga 2023, data menunjukkan adanya penurunan yang sejalan dengan pemulihan ekonomi dan pelaksanaan program bantuan sosial oleh pemerintah. Ini menandakan bahwa strategi pemulihan pasca-pandemi, termasuk peningkatan akses pekerjaan dan pemulihan sektor-sektor ekonomi penting, mulai memberikan dampak positif. Data ini juga menyoroti adanya perbedaan antarwilayah di DIY, di mana daerah selatan seperti Kulon Progo dan Gunungkidul mengalami tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah utara seperti Sleman dan Kota Yogyakarta. Tren penurunan kemiskinan pada akhir periode juga mengindikasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat DIY serta keberhasilan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif (Badan Pusat Statistik, 2024).

Terdapat beberapa faktor yang berkontribusi dalam menyebabkan kemiskinan ataupun mencegah dan mengurangi terjadinya kemiskinan. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pengentasan kemiskinan yang merupakan kebutuhan dasar bagi setiap individu. Indikator ini berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh. Tingkat pendidikan yang tinggi diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga individu dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam hal ini, pendidikan tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga berperan sebagai sarana untuk membuka peluang serta meningkatkan daya saing di pasar tenaga kerja. Dalam kerangka Teori Modal Manusia, pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan

ekonomi suatu negara, di mana investasi dalam pendidikan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Individu yang terdidik umumnya memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menyelesaikan tugas dan menghadapi tantangan di tempat kerja. Peningkatan produktivitas tersebut berkontribusi pada efisiensi dan inovasi di berbagai sektor ekonomi, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Choir & Hapsari, 2023).

Selain faktor pendidikan, Upah minimum memiliki peran penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Upah minimum merupakan tingkat kompensasi paling rendah yang wajib dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerja dalam sektor atau industri tertentu. Di Indonesia, kebijakan terkait upah minimum menjadi salah satu isu penting dalam ketenagakerjaan dan telah berkembang menjadi topik krusial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Sejarah kebijakan upah minimum di Indonesia dapat ditelusuri melalui beberapa peran utamanya. Pertama, penetapannya sangat dipengaruhi oleh sejarah perjuangan konflik perburuhan dan gerakan serikat pekerja. Selama beberapa dekade, serikat pekerja dan kelompok buruh terus mendorong kenaikan upah minimum sebagai strategi untuk mengurangi ketimpangan sosial dan memperbaiki kondisi kerja. Kedua, upah minimum berfungsi sebagai instrumen kebijakan pemerintah dalam perlindungan sosial, dengan tujuan melindungi pekerja dari potensi eksploitasi oleh pemberi kerja (Mukaromah et al., 2023).

Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan konsumsi domestik dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan memberikan upah yang layak, pekerja diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka sekaligus berkontribusi terhadap perekonomian melalui konsumsi. Meskipun demikian, kebijakan upah minimum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Beberapa hambatan tersebut meliputi perbedaan antara upah minimum dengan kenaikan biaya hidup, kesulitan dalam memastikan kepatuhan pemberi kerja terhadap pembayaran upah minimum, serta penyesuaian upah minimum yang mempertimbangkan aspek pemerataan dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Pemerintah Indonesia berupaya mengatasi tantangan tersebut melalui evaluasi dan penyempurnaan kebijakan upah minimum secara berkala. Upaya ini membutuhkan kerja sama yang lebih erat antara pemerintah, dunia usaha, dan serikat pekerja, serta

reformasi undang-undang yang mengatur mekanisme penetapan dan penyesuaian upah minimum.

Pada era globalisasi ini, pengangguran memiliki dampak yang signifikan terhadap kemiskinan. Pengangguran merupakan masalah yang dihadapi oleh berbagai wilayah, termasuk Provinsi D.I.Yogyakarta. International Labour Organization mendefinisikan pengangguran sebagai individu dalam kelompok usia kerja yang tidak bekerja selama periode tertentu, bersedia untuk menerima pekerjaan, serta sedang aktif mencari pekerjaan. Sementara itu, Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa pengangguran adalah jumlah angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari peluang kerja. Menurut Lundahl (2005), pertumbuhan penduduk yang tinggi mengindikasikan adanya peningkatan angkatan kerja, yang menuntut adanya penambahan jumlah lapangan kerja. Tanpa penambahan tersebut, dampak jangka panjang yang mungkin terjadi adalah peningkatan kemiskinan. Sejalan dengan pandangan Lundahl, O'Campo (2015) menyatakan bahwa bukti empiris menunjukkan hubungan langsung antara tingkat pengangguran dan meningkatnya kemiskinan (Aria Bhaswara Mohammad Bintang & Nenik Woyanti, 2018).

Selain itu faktor lain yang mempengaruhi strategi dalam mengatasi kemiskinan yaitu peningkatan IPM yang memiliki hubungan erat dengan pengurangan kemiskinan karena berkontribusi pada perbaikan di bidang kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Sebaliknya, kemiskinan yang tinggi dapat memperlambat peningkatan IPM, menciptakan lingkaran masalah yang menghambat perkembangan ekonomi dan sosial (Andykha et al., 2018). Untuk mengatasi kemiskinan, pendidikan dan pelatihan menjadi elemen kunci dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Langkah ini memiliki dampak langsung terhadap peningkatan keterampilan dan potensi penghasilan masyarakat, yang pada akhirnya membantu memutus rantai kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2017-2023 berdasarkan variabel tertentu dalam upaya pengembangan perekonomian dalam mengentaskan kemiskinan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat diambil kesimpulan pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh secara simultan tingkat pendidikan, Upah Minimum Kabupaten/Kota, tingkat pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi DIY tahun 2013-2023?
2. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi DIY tahun 2013-2023?
3. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi DIY tahun 2013-2023?
4. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi DIY tahun 2013-2023?
5. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi DIY tahun 2013-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh secara simultan tingkat pendidikan, Upah Minimum Kabupaten/Kota, tingkat pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi DIY tahun 2013-2023.
2. Menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi DIY tahun 2013-2023.
3. Menganalisis pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi DIY tahun 2013-2023.
4. Menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi DIY tahun 2013-2023.
5. Menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi DIY tahun 2013-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Akademik

Memberikan kontribusi untuk memperdalam pemahaman serta penambahan referensi dalam pengembangan teori pada penelitian-penelitian selanjutnya. Selain itu juga dapat memberikan dorongan dalam membuka diskusi dan penelitian para akademisi terhadap masalah kemiskinan yang harapannya dapat memicu untuk mengangkat isu kemiskinan agar dapat mengurangi masalah kemiskinan.

2. Pemerintah

Dengan adanya penelitian yang mengangkat masalah kemiskinan, diharapkan hal ini dapat membantu pemerintah untuk membuat kebijakan dalam menangani masalah kemiskinan baik secara struktural, sosial, maupun individu.

3. Masyarakat

Menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai pengaruh tingkat pendidikan, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dimaksudkan juga untuk dapat menyadarkan masyarakat keluar dari zona kemiskinan.

4. Penulis

Penelitian ini memberikan manfaat dalam memperluas pemahaman dan pengetahuan mengenai kemiskinan, serta meningkatkan kemampuan penulis dalam menganalisis permasalahan dan menerapkan teori-teori yang dipelajari selama perkuliahan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah ringkasan dari penelitian terdahulu yang berfungsi sebagai dasar untuk penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penulisan skripsi, merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya sangat penting untuk membandingkan kekurangan atau kelebihan dari penelitian yang sedang dilaksanakan. Penelitian sebelumnya dapat dijadikan sebagai landasan atau pertimbangan dalam perancangan dan pelaksanaan penelitian. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagai tinjauan pustaka pada penelitian ini :

Penelitian yang dilakukan oleh Choir & Hapsari (2023) yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Pendidikan dan Belanja Pemerintah terhadap Kemiskinan di Gerbangkertasusila Tahun 2015-2022”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Pendidikan, dan Belanja Pemerintah terhadap kemiskinan di wilayah Gerbangkertasusila selama periode 2015-2022. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori kuantitatif asosiatif, dengan sumber data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur. Analisis data dilakukan menggunakan model efek acak (Random Effect Model) melalui perangkat lunak EViews 9. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Pendidikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan. Sebaliknya, belanja pemerintah menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Secara simultan, TPT, Tingkat Pendidikan, dan Belanja Pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di wilayah Gerbangkertasusila.

Penelitian yang dilakukan oleh Dian Nugraha & Indira Hasmarini (2024) yang berjudul “Faktor-faktor Ekonomi yang Mempengaruhi Kemiskinan di Yogyakarta: studi Indeks gini, UMK, IPM, dan Pengangguran (2019-2023)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Indeks Gini, Upah Minimum Kerja (UMK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap tingkat kemiskinan di Yogyakarta selama periode 2019-2023. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dengan teknik regresi data panel,

dan memanfaatkan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, yang mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas hidup, baik dalam aspek pendidikan, kesehatan, maupun pendapatan, secara signifikan berkontribusi pada pengurangan kemiskinan. Sementara itu, Indeks Gini, UMK, dan TPT tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan, yang menyiratkan bahwa mungkin terdapat faktor-faktor lain yang lebih berperan dalam memengaruhi tingkat kemiskinan di Yogyakarta. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa keterbatasan, seperti cakupan periode yang terbatas serta fokus pada variabel tertentu, yang mungkin belum sepenuhnya mencerminkan kompleksitas faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Radityana et al., (2023) yang berjudul “Pengaruh Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran Terbuka terhadap Jumlah Kemiskinan di Provinsi Bali”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh upah minimum, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali pada periode 2012 hingga 2021. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali serta Perpustakaan UNTAB. Teknik analisis yang diterapkan meliputi uji asumsi klasik, koefisien determinasi berganda, regresi linier berganda, serta uji t dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum memiliki pengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia juga memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Di sisi lain, Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan pengaruh positif signifikan secara parsial terhadap kemiskinan di wilayah tersebut. Secara simultan, upah minimum, IPM, dan TPT secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali.

Penelitian yang dilakukan oleh (Alifah & Imaningsih, 2023) yang berjudul “Tingkat Pendidikan, Upah Minimum dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan, upah minimum, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta selama periode 2010-2021. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta, berupa data deret waktu (time series). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda, menggunakan model Ordinary Least Square (OLS) yang diolah melalui perangkat lunak SPSS versi 23.0 for Windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, variabel tingkat pendidikan, upah minimum, dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara parsial, upah minimum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sementara tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran terbuka tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di daerah tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2021) yang berjudul “Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh upah minimum, tingkat pengangguran terbuka, dan jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2010 hingga 2019. Faktor-faktor tersebut akan dianalisis dengan mengacu pada konsep kemiskinan, yang mencakup penyebab, ukuran, serta indikator kemiskinan. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan tingkat pengangguran, jenis-jenis pengangguran, dampak pengangguran, upah minimum, dan jumlah penduduk. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Tengah dalam bentuk data berkala (time series). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda, menggunakan model Ordinary Least Square (OLS), dan diolah dengan perangkat lunak SPSS versi 25.0 for Windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Sebaliknya, tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di wilayah tersebut.

Kamaruddin, dkk (2020) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2015-2019” menyatakan bahwa masyarakat dengan pendidikan menengah memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap penurunan jumlah penduduk miskin sebesar

73.1% di Kabupaten Sumbawa Barat. Pengaruh pendidikan tingkat menengah ke atas terhadap kemiskinan menunjukkan arah negatif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk dengan tingkat pendidikan menengah, maka jumlah penduduk miskin akan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena adanya kemampuan dan ketrampilan yang didapatkan dari proses pendidikan sebagai bekal untuk menjalankan dunia kerja.

Hardana, dkk (2022) dalam penelitiannya mengenai analisis ekonomi makro dan pengaruhnya terhadap kemiskinan mengatakan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Selatan. Hal ini dapat dibuktikan dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada karyawan pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan bahwa pendidikan merupakan peranan utama dalam pembangunan daerah. Dengan adanya kualitas pendidikan yang baik, maka akan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas yang nantinya dapat meningkatkan presentase kerja yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, pada tingkat pengangguran memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Adanya pengangguran dapat memberikan dampak penurunan tingkat kemakmuran masyarakat yang dapat menjadikan kemiskinan. Sedangkan, pada tingkat upah minimum tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada karyawan pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menyatakan bahwa upah minimum yang ditetapkan di Kabupaten Tapanuli Selatan tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Sholihin (2021) yang berjudul “Pengaruh Upah Minimum dan Tingkat Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur”. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur. Metode pengumpulan data mencakup penggunaan data dari BPS serta artikel-artikel yang relevan dengan penelitian yang memiliki kesamaan dengan studi ini. Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi Upah Minimum (X1), Tingkat Pengangguran (X2), dan Jumlah Kemiskinan (Y). Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, variabel yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur adalah Upah Minimum (X1) dengan tingkat signifikansi sebesar

0,004. Sementara itu, variabel Tingkat Pengangguran (X2) memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,237, yang menunjukkan bahwa secara parsial, variabel ini tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan (Y). Namun, secara simultan, variabel Upah Minimum (X1) dan Tingkat Pengangguran (X2) bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan (Y).

Penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas, (2018) mengenai “Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Cilacap” dengan menggunakan variabel independen adalah pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah lulusan SMA ke atas menunjukkan bahwa penduduk lulusan SMA ke atas memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Nilai koefisien regresi pada jumlah penduduk lulusan SMA ke atas menunjukkan nilai sebesar 1,343 yang artinya setiap peningkatan jumlah penduduk lulusan SMA ke atas sebesar 1 orang, maka akan menurunkan kemiskinan sebesar 1,377 orang dengan asumsi variabel lain yang dianggap tetap. Adanya hasil ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk lulusan SMA memiliki kontribusi untuk berkurangnya jumlah masyarakat miskin. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka akan menaikkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik (2023), Definisi kemiskinan dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu kemiskinan berdasarkan penyebabnya dan kemiskinan dari segi konseptual. Kemiskinan yang ditinjau dari penyebabnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural terjadi ketika faktor-faktor budaya atau adat istiadat di suatu wilayah menghalangi individu atau kelompok masyarakat tertentu untuk keluar dari kondisi kemiskinan. Sementara itu, kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh ketidakmampuan individu atau kelompok masyarakat dalam menghadapi sistem sosial yang tidak adil, di mana mereka berada dalam posisi yang lemah dan tidak memiliki akses untuk meningkatkan kondisi ekonomi atau sosial mereka, sehingga terperangkap dalam kemiskinan.

Kemiskinan secara konseptual dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada standar penilaiannya. Kemiskinan absolut didasarkan pada ukuran minimum yang dibutuhkan

untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik yang berkaitan dengan makanan maupun non-makanan, yang dikenal sebagai garis kemiskinan. Sementara itu, kemiskinan relatif dinilai berdasarkan ukuran yang ditentukan secara subjektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal. Individu atau kelompok yang berada di bawah standar tersebut dianggap miskin secara relatif.

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut mengacu pada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum, baik dalam hal makanan maupun non-makanan, yang dinyatakan dalam bentuk garis kemiskinan. Standar hidup minimum menjadi dasar dalam penentuan garis kemiskinan ini. Kemiskinan absolut ditentukan oleh ketidakmampuan individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bertahan hidup dan bekerja. Kebutuhan dasar ini sering diukur dalam bentuk finansial, yang dikenal sebagai garis kemiskinan. Oleh karena itu, individu dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan akan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Untuk membandingkan angka kemiskinan antarnegara, diperlukan garis kemiskinan absolut yang konsisten di seluruh negara. Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan absolut ini untuk membandingkan tingkat kemiskinan antarnegara, yang berguna dalam menentukan alokasi sumber daya finansial dan menganalisis kemajuan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Ukuran kemiskinan yang umum digunakan oleh Bank Dunia adalah batas kemiskinan berdasarkan paritas daya beli (PPP) dalam nilai USD per kapita per hari.

Saat ini, ukuran yang digunakan oleh Bank Dunia adalah: a) PPP USD 1,90 per kapita per hari, yang diperkirakan mencakup sekitar 1,3 miliar penduduk dunia yang hidup di bawah ukuran tersebut; dan b) PPP USD 3,20 per kapita per hari, yang mencakup sekitar 2,3 miliar penduduk yang hidup di bawah batas tersebut.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif adalah kondisi kemiskinan yang timbul akibat kebijakan pembangunan yang tidak merata di seluruh lapisan masyarakat, yang berujung pada ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Ukuran kemiskinan relatif sangat dipengaruhi oleh distribusi pendapatan atau pengeluaran di antara populasi. Kelompok penduduk yang dikategorikan sebagai relatif miskin dapat ditentukan, misalnya, dengan

mengambil 17 persen, 25 persen, atau 40 persen dari lapisan terendah total populasi yang diurutkan berdasarkan pendapatan atau pengeluaran.

Menurut Ravallion (1998), garis kemiskinan di negara kaya cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan negara miskin. Dalam karyanya yang berjudul "Poverty Lines in Theory and Practice: Living Standards Measurement Study," ia menjelaskan bahwa angka kemiskinan resmi di Amerika Serikat pada awal 1990-an, yang berada di kisaran 15 persen, hampir setara dengan angka kemiskinan di Indonesia yang juga mendekati 15 persen. Hal ini menunjukkan bahwa banyak individu yang dianggap miskin di Amerika Serikat mungkin akan dianggap sejahtera jika diukur dengan standar yang berlaku di Indonesia. Seiring dengan peningkatan kesejahteraan suatu negara, garis kemiskinan relatif cenderung direvisi menjadi lebih tinggi. Secara konseptual, kemiskinan relatif dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menentukan target populasi miskin. Namun, untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar negara dan dari waktu ke waktu, konsep kemiskinan relatif tidak dapat diterapkan, karena tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang serupa di berbagai konteks.

Kriteria Kemiskinan

Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan kriteria kemiskinan dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar, yang terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu kebutuhan makanan dan non-makanan. Kedua komponen ini diatur secara berbeda berdasarkan wilayah perkotaan dan perdesaan. Data yang digunakan dalam penyusunan komponen kebutuhan dasar tersebut berasal dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Ketidakmampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik dari segi makanan maupun non-makanan, diukur melalui pengeluaran mereka, dan ukuran ini dikenal sebagai Garis Kemiskinan. Penduduk Miskin didefinisikan sebagai individu atau kelompok yang memiliki pengeluaran rata-rata per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan tersebut.

Faktor penyebab kemiskinan

Menurut Arsyad (2010) dalam (Durrotul Mahsunah, 2011a), Kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor-faktor yang bersifat alamiah atau kultural, serta oleh faktor-faktor non-alamiah atau struktural. Faktor alamiah atau kultural mencakup kondisi yang berkaitan dengan aspek-aspek seperti kebiasaan, nilai, dan praktik budaya yang dapat mempengaruhi status ekonomi seseorang. Sementara itu, faktor non-alamiah

atau struktural melibatkan elemen-elemen sistemik dan institusional yang mempengaruhi distribusi kekayaan dan kesempatan, seperti kebijakan ekonomi, struktur pasar kerja, dan ketidakmerataan akses terhadap sumber daya.

Paul Spicker (dalam Wijayanto, 2010) mengidentifikasi empat pendekatan utama untuk menjelaskan penyebab kemiskinan, yang dikenal sebagai madzab. Pendekatan pertama adalah individual explanation, yang menekankan pada faktor-faktor pribadi dan karakteristik individu, seperti keterampilan, motivasi, dan keputusan yang diambil seseorang. Pendekatan kedua adalah familial explanation, yang memfokuskan pada peran dan dinamika keluarga dalam mempengaruhi kondisi ekonomi anggota keluarga. Pendekatan ketiga adalah subcultural explanation, yang menjelaskan kemiskinan melalui lensa budaya subkelompok tertentu, di mana norma dan nilai-nilai dalam kelompok tersebut dapat mempengaruhi peluang ekonomi anggotanya. Pendekatan keempat adalah structural explanation, yang melihat kemiskinan sebagai hasil dari struktur sosial dan ekonomi yang lebih luas, seperti ketidakadilan sistemik, ketidaksetaraan, dan kebijakan publik yang tidak mendukung. Keempat pendekatan ini memberikan kerangka yang komprehensif untuk memahami berbagai penyebab kemiskinan dan interaksi antara faktor-faktor individu, keluarga, budaya, dan struktural.

Ukuran Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), ukuran kemiskinan diukur berdasarkan dua komponen utama, yaitu konsumsi makanan dan konsumsi non-makanan. Untuk konsumsi makanan, BPS menggunakan patokan sebesar 2.100 kalori per orang per hari, yang diambil dari 52 jenis komoditas makanan yang dianggap mewakili pola konsumsi penduduk lapisan bawah. Sementara untuk konsumsi non-makanan, ditentukan dari 45 jenis komoditas yang relevan sesuai dengan kesepakatan nasional, tanpa membedakan antara wilayah pedesaan dan perkotaan.

Garis kemiskinan ini merupakan indikator batasan yang menetapkan tingkat kecukupan minimal, dan berlaku secara umum untuk semua kelompok umur, jenis kelamin, serta memperhitungkan berbagai faktor seperti berat badan dan status fisiologis. Penduduk yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan ini dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Menurut (Badan Pusat Statistik, 2024), Metode yang digunakan untuk menentukan tingkat kemiskinan melibatkan perhitungan Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen utama: Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Formula untuk menghitung Garis Kemiskinan adalah sebagai berikut:

$$GK = GKM + GKNM$$

Perhitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk wilayah perkotaan dan perdesaan. Individu dianggap miskin jika rata-rata pengeluaran per kapita mereka per bulan berada di bawah Garis Kemiskinan.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah nilai pengeluaran yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan makanan minimum, yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Komponen makanan yang dihitung mencakup 52 jenis komoditas, termasuk padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur, susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, serta minyak dan lemak. Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) mencakup pengeluaran minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar selain makanan, yaitu perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Untuk menghitung GKNM, paket komoditi non-makanan terdiri dari 51 jenis komoditas di wilayah perkotaan dan 47 jenis komoditas di wilayah perdesaan.

2.2.2 Pendidikan

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurut Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan merupakan usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk menciptakan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik mengembangkan potensi mereka secara aktif, baik secara fisik maupun mental, yang diperlukan untuk diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Ahmadi (2014) menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk membentuk dan meningkatkan kemampuan manusia secara menyeluruh dan berkelanjutan sehingga mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan serta mencapai kebahagiaan di masa kini maupun masa depan. Salah satu teori yang berkaitan erat dengan pendidikan adalah Teori Modal Manusia, yang menyatakan bahwa individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, yang diukur berdasarkan lama pendidikan, cenderung memiliki pekerjaan dengan gaji yang lebih

tinggi. Dalam konteks ini, upah mencerminkan produktivitas, sehingga individu yang lebih berpendidikan cenderung memiliki produktivitas lebih tinggi. Dampaknya, peningkatan jumlah individu berpendidikan akan berkontribusi pada peningkatan produktivitas nasional dan pertumbuhan ekonomi (Choir & Hapsari, 2023).

Kategori Tingkat Pendidikan

Menurut (Badan Pusat Statistik (BPS), 2023) Tingkat pendidikan dapat dikategorikan dalam beberapa jenis pengukuran, di antaranya yaitu :

1. Angka Kesiapan Sekolah (AKS) mengacu pada persentase siswa kelas 1 SD yang telah mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun ajaran sebelumnya, dibandingkan dengan total jumlah siswa yang saat ini berada di kelas 1 SD.
2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi penduduk dalam kelompok usia jenjang pendidikan tertentu yang masih mengikuti pendidikan formal, dibandingkan dengan total penduduk dalam kelompok usia tersebut.
3. Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan persentase penduduk dalam kelompok usia tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok usianya, dibandingkan dengan total penduduk pada kelompok usia tersebut.
4. Angka Partisipasi Kasar (APK) mengukur proporsi penduduk yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu, tanpa memperhitungkan kesesuaian usia mereka dengan jenjang pendidikan tersebut. Penghitungan ini mencakup seluruh individu yang masih mengikuti pendidikan pada jenjang tersebut, dibandingkan dengan total penduduk dalam kelompok usia yang seharusnya berada pada jenjang tersebut.
5. Angka Melek Huruf (AMH) mengacu pada persentase penduduk dalam kelompok umur tertentu yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam berbagai sistem tulisan, seperti huruf Latin, Arab, Jawa, Kanji, dan lainnya. Indikator ini dihitung sebagai proporsi dari total penduduk dalam kelompok umur tersebut yang memiliki kemampuan literasi dasar.
6. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan indikator yang menunjukkan jumlah tahun rata-rata pendidikan yang telah ditempuh oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas selama menjalani berbagai jenjang pendidikan. RLS dihitung berdasarkan

total tahun pendidikan yang dilalui, di mana bagi lulusan SD diasumsikan telah menempuh pendidikan selama 6 tahun, lulusan SMP selama 9 tahun, dan lulusan SMA selama 12 tahun, tanpa memperhitungkan apakah individu tersebut pernah tinggal kelas atau tidak selama masa pendidikan.

2.2.3 Upah Minimum

Upah merujuk pada pendapatan yang diterima tenaga kerja dalam bentuk uang, meliputi tidak hanya komponen upah dasar tetapi juga lembur dan tunjangan rutin seperti tunjangan transportasi, uang makan, dan tunjangan lainnya yang diterima secara reguler. Namun, tunjangan yang bersifat tidak rutin seperti tunjangan hari raya (THR), tunjangan tahunan, kwartalan, atau tunjangan lainnya yang tidak bersifat tetap tidak termasuk dalam definisi upah ini.

Menurut Gilarso (2003) dalam (Khoirus et al., 2021), terdapat beberapa sistem upah yang umum diterapkan, yaitu:

1. Upah Menurut Prestasi (Upah Potongan) : Sistem ini mengaitkan besaran upah langsung dengan prestasi kerja, di mana upah ditentukan berdasarkan jumlah hasil yang dicapai dalam periode tertentu. Sistem ini cocok diterapkan jika hasil kerja dapat diukur secara kuantitatif, seperti dengan memperhitungkan kecepatan mesin atau kualitas bahan yang digunakan.
2. Upah Waktu : Sistem upah ini menetapkan besaran upah berdasarkan lamanya waktu pekerja melakukan pekerjaan, yang dapat dihitung per jam, per hari, per minggu, atau per bulan. Sistem ini sering digunakan untuk jenis pekerjaan di mana hasilnya sulit diukur secara kuantitatif.
3. Upah Borongan : Dalam sistem upah borongan, balas jasa dibayarkan untuk suatu pekerjaan yang diborongan. Metode ini sering digunakan untuk pekerjaan yang dilakukan oleh kelompok kerja, di mana total upah ditentukan untuk seluruh pekerjaan dan kemudian dibagi di antara para pelaksana. Contohnya termasuk pekerjaan konstruksi atau pembuatan sumur.
4. Upah Premi : Upah premi merupakan gabungan dari upah waktu dan upah potongan. Upah dasar diberikan untuk prestasi yang dianggap "normal" berdasarkan waktu atau jumlah hasil kerja. Jika seorang pekerja melebihi prestasi tersebut, mereka akan menerima premi. Premi juga dapat diberikan untuk penghematan waktu, penghematan bahan, atau kualitas produk yang baik. Dalam

perusahaan modern, patokan untuk prestasi minimal sering ditentukan secara ilmiah melalui studi waktu dan gerak.

5. Upah Bagi Hasil : Metode ini umum di bidang pertanian dan usaha keluarga, tetapi juga dikenal di luar sektor tersebut. Dalam sistem ini, pekerja atau pelaksana diberikan bagian dari keuntungan bersih perusahaan. Misalnya, dalam perusahaan, direktur dapat menerima tantieme (bagian dari laba yang diberikan kepada pemegang saham), dan pekerja bisa diberi saham perusahaan, menjadikan mereka pemilik saham.
6. Upah Pegawai Negeri : Upah Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditentukan berdasarkan prinsip pendidikan dan masa kerja. Setiap pegawai negeri menerima gaji pokok yang ditetapkan menurut golongan dan masa kerja mereka.

2.2.4 Pengangguran

Pengangguran dapat dikategorikan dalam beberapa jenis berdasarkan penyebabnya dan ciri-cirinya. Menurut Sukirno (2007) dalam (Khoirus et al., 2021), pengangguran dibagi menjadi dua kategori utama: pengangguran terselubung atau tersembunyi, dan pengangguran musiman.

Pengangguran terselubung atau tersembunyi merujuk pada tenaga kerja yang memiliki produktivitas marjinal yang sangat rendah atau bahkan nol. Meskipun mereka terlibat dalam pekerjaan, kontribusi mereka tidak meningkatkan tingkat produksi secara signifikan. Sebaliknya, pengangguran musiman terjadi pada periode tertentu dalam tahun, misalnya saat kegiatan pertanian atau produksi lainnya mengalami penurunan signifikan dibandingkan dengan periode lainnya.

Menurut Sumarsono (2003) dalam (Khoirus et al., 2021), pengangguran adalah individu yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali atau bekerja kurang dari dua hari dalam seminggu sebelum periode pencacahan dan sedang berusaha mencari pekerjaan. Sebaliknya, seseorang dianggap bekerja jika mereka mendapatkan penghasilan minimal dua hari dalam seminggu sebelum hari pencacahan.

Jenis-jenis Pengangguran dapat dikelompokkan berdasarkan penyebabnya dan ciri-cirinya:

1. Pengangguran Berdasarkan Penyebabnya :
 - a. Pengangguran Friksional : Merupakan pengangguran normal yang dianggap sudah mencapai kesempatan kerja penuh jika terjadi pada tingkat 2-3 persen.

Pengangguran jenis ini terjadi karena pergeseran pekerjaan atau transisi antar pekerjaan.

- b. Pengangguran Siklikal : Terjadi akibat penurunan harga komoditas atau fluktuasi siklus ekonomi yang menyebabkan permintaan tenaga kerja menurun dibandingkan dengan penawaran tenaga kerja.
- c. Pengangguran Struktural : Disebabkan oleh kemerosotan beberapa faktor produksi yang mengakibatkan penurunan kegiatan produksi dan pemutusan hubungan kerja.
- d. Pengangguran Teknologi : Terjadi ketika tenaga kerja manusia digantikan oleh mesin atau teknologi industri.

2. Pengangguran Berdasarkan Ciri-cirinya :

- a. Pengangguran Musiman : Terjadi karena fluktuasi jangka pendek dalam kegiatan ekonomi. Contoh termasuk petani yang menunggu musim tanam atau pedagang musiman seperti penjual durian.
- b. Pengangguran Terbuka : Terjadi ketika jumlah lapangan kerja yang tersedia tidak dapat mengimbangi pertambahan jumlah pencari kerja.
- c. Pengangguran Tersembunyi : Terjadi ketika jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi melebihi jumlah yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan tersebut secara efisien.
- d. Setengah Menganggur : Merujuk pada pekerja yang bekerja kurang dari jam kerja normal, yaitu antara 1-4 jam sehari, yang dikenal juga sebagai underemployment.

2.2.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia dapat dipahami sebagai suatu proses yang bertujuan untuk memperluas pilihan dan kesempatan bagi individu, terutama dalam hal akses terhadap hasil-hasil pembangunan seperti pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan, pembangunan manusia dievaluasi melalui tiga dimensi dasar yang utama.

- 1. Dimensi pertama adalah umur panjang dan sehat, yang diukur dengan indikator angka harapan hidup. Indikator ini mencerminkan rata-rata umur yang diharapkan dapat dicapai oleh individu dalam suatu populasi, serta kesehatan umum yang dinikmati sepanjang hidup mereka.

2. Dimensi kedua adalah pengetahuan, yang diukur dengan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama bersekolah. Angka melek huruf menggambarkan persentase populasi yang mampu membaca dan menulis, sementara rata-rata lama bersekolah menunjukkan durasi pendidikan formal yang telah dijalani oleh individu, yang berhubungan langsung dengan kualitas pendidikan yang diterima.
3. Dimensi ketiga adalah kehidupan yang layak, yang dipresentasikan oleh indikator kemampuan daya beli. Indikator ini mencerminkan tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat, serta sejauh mana mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar dan menikmati standar hidup yang memadai.

Ketiga dimensi ini memberikan gambaran komprehensif tentang sejauh mana pembangunan manusia telah berhasil dalam meningkatkan kualitas hidup individu, dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi. Dengan demikian, evaluasi pembangunan manusia mencakup penilaian terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan dan kemampuan individu untuk mengakses berbagai peluang dalam kehidupan mereka.

Menurut perspektif United Nations Development Programme (UNDP), pembangunan manusia didefinisikan sebagai upaya untuk memperluas pilihan yang tersedia bagi individu serta meningkatkan taraf hidup yang dicapai melalui proses tersebut. Dalam pandangan UNDP, pembangunan manusia juga dipahami sebagai proses pengembangan kemampuan individu melalui perbaikan dalam aspek kesehatan, pengetahuan, dan keterampilan.

Konsep pembangunan manusia yang diusung oleh UNDP melibatkan empat elemen utama:

1. Produktivitas, yang berkaitan dengan kemampuan dan kontribusi individu dalam kegiatan ekonomi.
2. Pemerataan, yang fokus pada keadilan dan kesetaraan dalam distribusi peluang dan hasil pembangunan.
3. Kestinambungan, yang menekankan pentingnya keberlanjutan dalam proses pembangunan untuk memastikan manfaat jangka panjang.

4. pemberdayaan, yang berorientasi pada peningkatan kapasitas dan kekuatan individu untuk mengambil keputusan dan mempengaruhi kondisi kehidupan mereka.

Komponen IPM

Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencakup beberapa elemen penting, yaitu: Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan.

1. Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH), atau Life Expectancy at Birth, mengacu pada rata-rata jumlah tahun yang diperkirakan dapat dijalani seseorang sejak lahir. Indikator ini mencerminkan tingkat kesehatan suatu populasi dan dihitung berdasarkan data dari sensus dan survei kependudukan.
2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) atau Mean Years of Schooling (MYS), menunjukkan rata-rata jumlah tahun pendidikan formal yang telah dijalani oleh individu dalam suatu populasi.
3. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) atau Expected Years of Schooling (EYS), merujuk pada jumlah tahun pendidikan yang diperkirakan dapat dicapai oleh anak-anak pada usia sekolah.
4. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan diukur dengan menggunakan nilai pengeluaran per kapita yang dikoreksi berdasarkan paritas daya beli (Purchasing Power Parity - PPP), yang memungkinkan perbandingan standar hidup antara berbagai negara dengan memperhitungkan perbedaan biaya hidup.

Keempat komponen ini secara bersama-sama memberikan gambaran tentang tingkat pembangunan manusia dengan mengukur kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Angka Harapan Hidup dihitung dengan metode tidak langsung menggunakan varian Trussel dari metode Brass, dengan tabel kehidupan Coale-Demeney West Model. Data yang digunakan mencakup RALH (Rasio Angka Kematian Ibu) dan RAMH (Rasio Angka Kematian Anak) yang dikategorikan menurut kelompok umur ibu (15-19, 20-24, ..., 45-49).

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun pendidikan formal yang dijalani oleh penduduk. Dalam perhitungan ini, diasumsikan bahwa rata-

rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan menurun dalam kondisi normal. Penghitungan RLS hanya melibatkan penduduk yang berusia 25 tahun ke atas. Proses perhitungan melibatkan empat variabel secara bersamaan:

1. Status sekolah (apakah belum pernah sekolah, masih bersekolah, atau sudah tidak bersekolah lagi).
2. Jenjang pendidikan yang pernah atau sedang ditempuh.
3. Kelas tertinggi yang pernah atau sedang diikuti, dan
4. Jenjang pendidikan tertinggi yang telah diselesaikan.

Konversi lama bersekolah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tertera pada lampiran.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah estimasi jumlah tahun pendidikan yang diharapkan akan dicapai oleh anak-anak di masa depan pada usia tertentu. HLS diasumsikan berdasarkan peluang anak untuk tetap bersekolah pada usia-usia mendatang yang sama dengan peluang penduduk yang bersekolah saat ini pada usia yang sama. Perhitungan HLS dilakukan untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas dan memberikan informasi tentang kondisi sistem pendidikan di berbagai jenjang, dalam bentuk lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh anak-anak.

Pengeluaran per Kapita setahun diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), dengan perhitungan dilakukan dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Data pengeluaran per kapita dikonversi ke nilai konstan dengan tahun dasar 2012=100. Penghitungan paritas daya beli (Purchasing Power Parity - PPP) pada metode baru melibatkan 96 komoditas, di mana 66 adalah komoditas makanan dan sisanya adalah komoditas non-makanan. Metode perhitungan paritas daya beli ini menggunakan metode Rao.

2.3 Hubungan Antara Variabel Independen dengan Variabel Dependen

2.3.1 Hubungan Antara Tingkat Pendidikan dengan Tingkat Kemiskinan

Pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kemampuan negara berkembang untuk mengadopsi teknologi modern dan menciptakan pertumbuhan berkelanjutan (Todaro, 2006). Menurut Mankiew (2000), individu dengan pendidikan tinggi mampu menghasilkan inovasi dalam produksi barang dan jasa, yang jika diterima luas, memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini, pendidikan memberikan pengembalian yang lebih besar kepada masyarakat

dibandingkan individu. Teori lingkaran setan kemiskinan dari Nurse menunjukkan bahwa keterbelakangan dapat diatasi melalui pendidikan, yang berfungsi sebagai modal manusia. Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin besar produktivitas dan pendapatannya, yang pada akhirnya membantu mereka keluar dari kemiskinan (Wahyudi & Rejekingsih, 2013).

2.3.2 Hubungan Antara Upah Minimum Kabupaten/Kota dengan Tingkat Kemiskinan

Upah minimum merupakan kebijakan ekonomi yang dirancang untuk menjamin bahwa pekerja memperoleh pendapatan yang cukup guna memenuhi kebutuhan hidup dasar. Tujuannya adalah memastikan adanya standar upah yang layak sehingga pekerja dengan pendapatan rendah dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Peningkatan upah minimum secara teoritis diharapkan dapat meningkatkan daya beli serta pendapatan kelompok berpenghasilan rendah, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada tingkat kesesuaian besaran upah minimum dengan biaya hidup aktual di suatu daerah serta implementasi yang konsisten di lapangan. Jika upah minimum ditetapkan pada level yang tidak memadai atau kebijakan tersebut tidak diimplementasikan dengan baik, dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan cenderung terbatas. Selain itu, kebijakan upah minimum yang tidak proporsional juga dapat berdampak negatif, seperti peningkatan biaya tenaga kerja yang mendorong pengurangan lapangan kerja atau meningkatnya tingkat pengangguran, terutama di sektor usaha kecil dan menengah. Dengan demikian, kebijakan upah minimum memerlukan kajian mendalam dan penyesuaian yang terus menerus agar dapat berfungsi secara efektif dalam mendukung kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan (Dian Nugraha & Indira Hasmarini, 2024).

2.3.3 Hubungan Antara Tingkat Pengangguran dengan Tingkat Kemiskinan

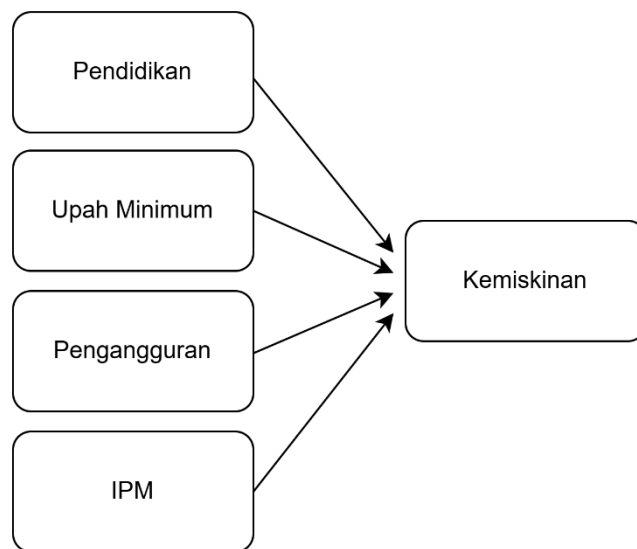
Jumlah pengangguran mencerminkan proporsi angkatan kerja yang aktif mencari pekerjaan namun belum berhasil memperoleh kesempatan kerja, yang mencerminkan kendala dalam penyerapan tenaga kerja dan berdampak pada meningkatnya kemiskinan. Tingginya pengangguran menunjukkan terbatasnya peluang kerja, yang berdampak langsung pada pendapatan dan daya beli masyarakat, sehingga memperburuk kondisi ekonomi. Selain itu, pengangguran struktural memperlambat

pertumbuhan ekonomi dengan menghambat kontribusi produktif individu. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kebijakan yang efektif, seperti peningkatan akses pendidikan, pelatihan keterampilan, serta penciptaan lapangan kerja melalui investasi dan pembangunan infrastruktur (Dian Nugraha & Indira Hasmarini, 2024).

2.3.4 Hubungan Antara Indeks Pembangunan Manusia dengan Tingkat Kemiskinan

Hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingkat kemiskinan menunjukkan korelasi yang signifikan, di mana peningkatan IPM, yang mencerminkan perbaikan pada pendidikan, kesehatan, dan standar hidup, cenderung menurunkan tingkat kemiskinan. Dengan akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, produktivitas masyarakat meningkat, yang berujung pada peningkatan pendapatan dan pengurangan kemiskinan. Sebagai salah satu indikator utama, IPM bersama dengan faktor lain seperti Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), pendidikan, dan tingkat pengangguran, memberikan pengaruh besar terhadap tingkat kemiskinan, sehingga menuntut pendekatan multidimensional untuk pengentasannya (Radityana et al., 2023).

2.4 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara mengenai perilaku atau fenomena yang sedang diteliti. Hipotesis ini menyajikan kemungkinan dua hasil, yaitu benar atau salah. Berdasarkan pemikiran teoritis serta referensi dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini, hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Diduga secara simultan tingkat pendidikan, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), tingkat pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan
2. Diduga tingkat pendidikan memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan.
3. Diduga Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.
4. Diduga tingkat pengangguran memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.
5. Diduga Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan sumber data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder merujuk pada data yang tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti, melainkan diperoleh melalui pihak ketiga. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Badan Pusat Statistik (BPS). Data dalam penelitian ini yaitu data panel yang terdiri dari data time series selama periode waktu 2013-2023 dan data cross section yang terdiri dari 5 Kota/Kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan model statistik dengan bantuan perangkat lunak Eviews 12.0. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Data tingkat kemiskinan yang terdiri dari persentase penduduk miskin di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2013-2023.
2. Data tingkat pendidikan yaitu presentase penduduk 15 tahun ke atas menurut ijazah tertinggi SLTA di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2013-2023.
3. Data Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2013-2023.
4. Data presentase tingkat pengangguran di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2013-2023.
5. Data Indeks Pembangunan Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2013-2023.

3.2 Data Operasional Variabel

Definisi variabel operasional pada penelitian ini yaitu menggunakan variabel independen dan variabel dependen. Berikut ini merupakan definisi variabel operasional, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Definisi Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Parameter	Pengukuran
Kemiskinan (Y)	Variabel Dependen Kondisi di mana individu atau kelompok tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.	Persentase Penduduk Miskin	Persen
Tingkat Pendidikan (X1)	Indikator yang menunjukkan presentase penduduk berusia 15 tahun menurut ijazah tertinggi SLTA ke atas	Presentase Penduduk lulusan SMA ke atas	Persen
Upah Minimum (X2)	Tingkat kompensasi yang ditetapkan oleh pemerintah atau badan berwenang yang harus dibayar kepada pekerja dalam jangka waktu tertentu.	Upah Minimum Kabupaten	Rupiah
Pengangguran (X3)	Keadaan di mana individu yang termasuk dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan namun sedang aktif mencari pekerjaan.	Persentase Tingkat Pengangguran	Persen
Indeks Pembangunan Manusia (X2)	Ukuran komposit yang digunakan untuk menilai dan membandingkan tingkat perkembangan manusia di berbagai wilayah atau negara.	Persentase Indeks Pembangunan Manusia	Persen

3.3 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel, yang merupakan kombinasi antara data *time series* dan data *cross section*. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Eviews 12.0. Menurut Widarjono (2016), data panel menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan dengan data *cross section* atau data *time series* secara terpisah. Data panel memungkinkan penggunaan informasi yang lebih luas, sehingga menghasilkan derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang lebih tinggi. Gabungan antara data *time series* dan data *cross section* ini dapat mengatasi masalah yang timbul akibat penghilangan variabel. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it}$$

Keterangan :

Y	: Kemiskinan (Persen)
X ₁	: Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Ijazah Tertinggi SLTA keatas (Persen)
X ₂	: Upah Minimum Kabupaten/Kota (Rupiah)
X ₃	: Pengangguran (Persen)
X ₄	: Indeks Pembangunan Manusia (Persen)
β ₀	: Intersep
β ₁ β ₂ β ₃	: Koefisien regresi variabel independen
e	: Error

3.3.1 Common Effect Model (CEM)

Common Effect Model (CEM) adalah model yang paling sederhana dalam pendekatan analisis data panel. Keistimewaan dari metode ini adalah kesederhanaannya, yang terletak pada penggabungan langsung antara data *time series* dan data *cross section*. CEM hanya memperhitungkan efek rata-rata dari variabel independen terhadap variabel dependen tanpa mempertimbangkan perbedaan individual atau waktu.

Estimasi model ini dilakukan menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS), yang memungkinkan penilaian hubungan antara variabel dengan cara yang efisien dan mudah diterapkan. Dalam kerangka CEM, setiap koefisien dalam model

memiliki intersep yang sama di seluruh unit dan periode waktu, yang berarti bahwa nilai konstan untuk semua unit tidak bervariasi.

3.3.2 *Fixed Effect Model (FEM)*

Fixed Effect Model (FEM) adalah pendekatan regresi dalam analisis data panel yang memungkinkan perbedaan dalam intersep untuk setiap entitas dalam data *cross section*. Dalam model ini, setiap data dapat memiliki intersep yang berbeda. Namun, kemiringan (*slope*) koefisien variabel independen tetap seragam. Estimasi model ini dilakukan dengan menggunakan metode *Least Square Dummy Variable (LSDV)*, yang menambahkan variabel dummy untuk setiap data untuk memberikan efek yang tetap. Adapun model *Fixed Effect* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \alpha_1 D_1 + \dots + e$$

3.3.3 *Random Effect Model (REM)*

Random Effect Model (REM) adalah pendekatan regresi dalam analisis data panel yang dirancang untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas dan efisiensi estimasi parameter. Dalam model ini, terdapat variasi dalam intersep antar data, namun kemiringan koefisien tetap seragam. Salah satu keuntungan utama dari REM adalah kemampuannya untuk mengurangi masalah heteroskedastisitas, yaitu variasi yang tidak konsisten dalam varians kesalahan. REM juga dikenal dengan sebutan *Error Component Model (ECM)*, yang mencerminkan cara model ini memisahkan komponen kesalahan menjadi bagian tetap dan acak. Adapun model *Random Effect* pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \alpha_1 D_1 + \dots + \epsilon_i + e$$

3.4 **Pemilihan Metode Estimasi Regresi Data Panel**

Dalam analisis model regresi data panel, terdapat tiga model utama yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk menentukan model yang paling sesuai dalam mengestimasi regresi data panel, diperlukan kriteria pengujian yang dapat membantu memilih model yang paling tepat. Kriteria ini bertujuan untuk memastikan pemilihan model yang optimal berdasarkan karakteristik data dan kebutuhan analisis. Untuk

memilih model yang tepat maka perlu pengujian yang harus dilakukan yaitu Uji chow. Uji hausman, dan Uji LM sebagai berikut :

3.4.1 Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk menentukan model yang paling sesuai antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM) dalam analisis data panel. Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut:

H_0 : *Common Effect Model* (CEM) adalah model yang lebih tepat.

H_1 : *Fixed Effect Model* (FEM) adalah model yang lebih tepat.

Jika nilai probabilitas hasil uji lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan (5%), maka hipotesis nol (H_0) ditolak, yang berarti FEM adalah model yang lebih tepat. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi, maka H_0 diterima, menunjukkan bahwa CEM adalah model yang lebih sesuai. Apabila H_0 diterima, maka CEM dianggap sebagai model terbaik. Namun, jika H_0 ditolak, FEM dianggap lebih baik di antara kedua model tersebut, dan langkah selanjutnya adalah melakukan uji *Random Effect Model* (REM) untuk menentukan model akhir yang paling optimal.

3.4.2 Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk menentukan model yang lebih tepat antara *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM) dalam analisis data panel. Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut:

H_0 : *Random Effect Model* (REM) adalah model yang lebih tepat.

H_1 : *Fixed Effect Model* (FEM) adalah model yang lebih tepat.

Jika nilai probabilitas hasil uji lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan (5%), maka hipotesis nol (H_0) ditolak, yang menunjukkan bahwa FEM adalah model yang lebih sesuai. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi, maka H_0 diterima, yang berarti REM adalah model yang lebih tepat. Dengan demikian, jika H_0 diterima, REM dianggap sebagai model terbaik. Namun, jika H_0 ditolak, FEM dianggap sebagai model yang lebih baik untuk digunakan dalam analisis.

3.4.3 Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji LM merupakan pengujian yang dikembangkan oleh Breusch-Pagan, digunakan untuk memilih metode terbaik antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Random Effect Model* (REM). Uji ini memanfaatkan nilai residual dari metode *Ordinary Least Squares* (OLS) untuk menguji signifikansi dari model Random Effect. Hipotesis dalam uji LM adalah sebagai berikut:

H_0 : *Common Effect Model* (CEM) adalah model yang lebih baik.

H_1 : *Random Effect Model* (REM) adalah model yang lebih baik.

Jika nilai probabilitas dari uji LM lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan (5%), maka hipotesis nol (H_0) ditolak, yang menunjukkan bahwa *Random Effect Model* (REM) adalah model yang lebih sesuai. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi, hipotesis nol diterima, menunjukkan bahwa *Common Effect Model* (CEM) adalah model yang lebih tepat.

3.5 Uji Signifikansi

3.5.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini digunakan untuk mengukur proporsi variasi total dalam variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen. Semakin tinggi nilai R^2 maka semakin jelas hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Begitu pun sebaliknya, jika nilai R^2 rendah maka hubungan antara variabel dependen dan variabel independen menjadi kurang jelas.

3.5.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengevaluasi apakah variabel-variabel independen secara kolektif mempengaruhi variabel dependen dalam model regresi. Uji ini dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Dengan kata lain, uji F bertujuan untuk menentukan apakah kombinasi dari semua variabel independen memiliki efek yang signifikan terhadap variabel dependen secara simultan.

Jika nilai F hitung melebihi nilai F tabel, maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_1) diterima. Ini mengindikasikan bahwa variabel-variabel independen secara bersamaan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yang berarti bahwa model regresi secara keseluruhan memiliki kemampuan yang baik dalam menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai F hitung lebih kecil dari nilai F tabel, maka hipotesis nol (H_0) diterima. Hal ini

menunjukkan bahwa variabel-variabel independen secara simultan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Dalam hal ini, model regresi tidak menunjukkan hubungan yang substansial antara variabel independen dan variabel dependen secara keseluruhan. Hipotesis yang diuji dalam uji F adalah sebagai berikut: $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$, yang berarti bahwa semua koefisien regresi variabel independen adalah nol, sehingga tidak ada pengaruh simultan dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, perubahan dalam variabel independen tidak berkontribusi terhadap variasi dalam variabel dependen.

$H_1 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$, yang menunjukkan bahwa setidaknya salah satu dari koefisien regresi variabel independen tidak sama dengan nol, dan oleh karena itu, variabel independen memiliki pengaruh simultan terhadap variabel dependen. Dalam hal ini, perubahan pada variabel independen secara bersamaan berkontribusi terhadap variasi dalam variabel dependen.

3.5.3 Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%. Apabila nilai P-value lebih kecil dari tingkat signifikansi (α), maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai P-value lebih besar dari α , maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Berikut adalah hipotesis yang diuji dalam uji T:

1. Pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan:

$H_0 : \beta =$ tidak ada pengaruh antara tingkat pendidikan terhadap kemiskinan.

$H_1 : \beta \neq$ terdapat pengaruh antara tingkat pendidikan terhadap kemiskinan.
2. Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap kemiskinan:

$H_0 : \beta =$ tidak ada pengaruh antara Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap kemiskinan.

$H_1 : \beta \neq$ terdapat pengaruh antara Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap kemiskinan.
3. Pengaruh tingkat pengangguran terhadap kemiskinan:

$H_0 : \beta =$ tidak ada pengaruh antara tingkat pengangguran terhadap kemiskinan.

$H_1 : \beta \neq$ terdapat pengaruh antara tingkat pengangguran terhadap kemiskinan.
4. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap kemiskinan:

$H_0 : \beta =$ tidak ada pengaruh antara Indeks Pembangunan Manusia terhadap kemiskinan.

$H_1 : \beta \neq$ terdapat pengaruh antara Indeks Pembangunan Manusia terhadap kemiskinan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Statistik Deskriptif

Jenis data ini menggunakan kombinasi data panel yang mencakup data *cross section* dan data *time series*. Data *cross section* diperoleh dari 4 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, data *time series* meliputi Penduduk Lulusan SMA ke Atas, Upah Minimum Kabupaten (UMK), Tingkat Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2017-2023. Informasi yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengujian estimasi dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Eviews 12.

Statistik deskriptif adalah metode analisis yang menggunakan nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum untuk menggambarkan karakteristik variabel dalam penelitian. Rata-rata diperoleh dengan membagi total data dengan jumlah data yang ada, sementara standar deviasi dihitung sebagai akar dari jumlah kuadrat selisih antara setiap nilai data dengan rata-rata data. Nilai tertinggi dalam data disebut maksimum, sedangkan nilai terendah disebut minimum.

Tabel 4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Maximum	Minimum
Kemiskinan (Y)	13.33600	21.70000	6.490000
Pendidikan (X1)	47.27509	68.02000	16.09000
UMK (X2)	155113	2324776	947144.0
Tingkat Pengangguran (X3)	3.817273	9.160000	1.490000
IPM (X4)	78.07255	88.61000	66.31000

Sumber: Olah data menggunakan Eviews12

Berdasarkan hasil analisis statistik pada Tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki nilai rata-rata Kemiskinan sebesar 13.33600 dengan sampel yang digunakan tahun 2013-2023. Kabupaten Kulon Progo mencatatkan tingkat kemiskinan tertinggi dengan jumlah 20.03%, hal ini disebabkan oleh sektor pertanian dengan produktivitas yang relatif rendah. Sebaliknya, Kota Yogyakarta memiliki persentase kemiskinan yang paling kecil yaitu 6.49%, karena Kota Yogyakarta memiliki infrastruktur yang lebih baik dan lebih lengkap dibandingkan daerah lain di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seperti jalan, transportasi, dan fasilitas umum lainnya yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan lebih stabil.

Pendidikan lulusan SMA ke atas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan rata-rata sebesar 47.27%, dengan tingkat lama sekolah tertinggi di Kota Yogyakarta sebesar 12,11%. Hal ini disebabkan karena Kota Yogyakarta sebagai pusat pendidikan dengan banyaknya sekolah unggulan dan institusi pendidikan berkualitas, seperti perguruan tinggi, sekolah menengah, dan sekolah dasar. Keberadaan institusi-institusi ini menciptakan lingkungan yang sangat mendukung bagi pendidikan, sehingga siswa memiliki akses yang luas terhadap pendidikan. Sebaliknya, tingkat lama sekolah terendah tercatat di Kabupaten Gunungkidul dengan angka sebesar 16,09%. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Gunungkidul, seperti jumlah sekolah, kualitas gedung, dan fasilitas belajar yang tidak memadai yang mengakibatkan dampak negatif terhadap kualitas pendidikan.

Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki rata-rata sebesar Rp. 1.551.130, dengan UMK tertinggi tercatat di Kota Yogyakarta, yaitu sebesar Rp. 2.324.776. Hal ini disebabkan oleh Kota Yogyakarta sebagai pusat ekonomi dan bisnis, dengan banyaknya sektor industri, jasa, serta pusat perdagangan yang mendorong kenaikan upah minimum. Sebaliknya, Kabupaten Gunungkidul memiliki UMK terendah di provinsi tersebut, yaitu sebesar Rp. 947.144. Kondisi ini dapat disebabkan karena terbatasnya sektor industri dan lapangan pekerjaan di Kabupaten Gunungkidul yang mengakibatkan rendahnya daya tawar pekerja dan tingkat upah yang lebih rendah dibandingkan dengan wilayah lain.

Tingkat pengangguran di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan rata-rata sebesar 3.81%, dengan tingkat pengangguran tertinggi di Kota Yogyakarta

sebesar 9.16%, yang disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dan ketersediaan lapangan kerja. Sebaliknya, Kabupaten Kulon Progo memiliki tingkat pengangguran terendah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 1.49%, yang disebabkan oleh keberhasilan pemerintah daerah menciptakan lapangan kerja. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah meluncurkan berbagai program pengembangan ekonomi lokal yang fokus pada sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan kerajinan yang berhasil menciptakan lapangan kerja yang signifikan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan rata-rata sebesar 78.07, dengan IPM tertinggi yaitu Kota Yogyakarta sebesar 88.61. Tingginya angka tersebut dipengaruhi oleh optimalnya akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kualitas hidup yang memadai di kawasan perkotaan. Sebaliknya, Kabupaten Gunungkidul mencatat IPM terendah di provinsi ini, yaitu sebesar 66.31, yang dipengaruhi oleh tantangan geografis serta keterbatasan akses terhadap sarana pendidikan dan kesehatan. Kendati demikian, pemerintah daerah Gunungkidul terus berupaya meningkatkan IPM melalui berbagai inisiatif, termasuk pengembangan infrastruktur dasar, perbaikan layanan kesehatan, serta peningkatan kualitas pendidikan, terutama di wilayah pedesaan.

4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan

Dalam analisis data panel, terdapat tiga metode regresi utama yang dapat digunakan, yaitu Common Effect, Fixed Effect, dan Random Effect. Untuk menentukan model regresi yang paling sesuai, perlu dilakukan beberapa uji statistik yaitu uji Chow, uji LM (Lagrange Multiplier), dan uji Hausman.

4.2.1 Common Effect Model

Hasil regresi data panel dengan metode Common Effect Model dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2 Hasil Estimasi *Common Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	81.80656	9.082916	9.006640	0.0000
X1	0.096245	0.064433	1.493728	0.1415
X2	6.12E-08	7.01E-07	0.087373	0.9307
X3	-0.093734	0.231096	-0.405604	0.6868
X4	-0.931924	0.156985	-5.936399	0.0000
R-squared	0.891615			
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Hasil Olahan Eviews12

4.2.2 Fixed Effect Model

Hasil regresi data panel dengan metode Fixed Effect Model dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.3 Hasil Estimasi *Fixed Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	112.1968	21.85320	5.134113	0.0000
X1	-0.038803	0.035141	-1.104194	0.2753
X2	2.69E-06	1.32E-06	2.036206	0.0475
X3	0.113923	0.133240	0.855021	0.397
X4	-1.201745	0.308665	-4.217334	0.0001
R-squared	0.985839			
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Hasil Olah Data Eviews12

5.2.3 Random Effect Model

Hasil regresi data panel dengan metode random effect model dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4 Hasil Estimasi *Random Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	81.80656	3.422936	23.89953	0.0000
X1	0.096245	0.024282	3.963675	0.0002
X2	6.12E-08	2.64E-07	0.231848	0.8176
X3	-0.093733	0.087090	-1.076288	0.2870
X4	-0.931924	0.059160	-15.75250	0.0000
R-squared	0.891615			
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Hasil Olah Data Eviews12

4.3 Pemilihan Model Terbaik

4.3.1 Uji Chow

Hasil pemilihan model regresi data panel, baik dengan menggunakan pendekatan Common Effect maupun Fixed Effect, yang dilakukan melalui uji Chow, disajikan dalam Tabel 4.5 berikut ini:

Tabel 4.5 Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	76.516278	(4,26)	0.0000
Cross-section Chi-square	111.934610	4	0.0000

Sumber : Hasil Olahan Eviews12

Berdasarkan hasil uji Chow yang tertera, diperoleh nilai probabilitas Cross-Section Chi-square sebesar 0.0000 lebih kecil dari 0.05 atau alpha 5%. Oleh karena itu, H_0 ditolak, sehingga model yang lebih sesuai untuk digunakan adalah Fixed Effect Model.

4.3.2 Uji Hausman

Hasil pemilihan model regresi data panel, baik dengan menggunakan pendekatan Fixed Effect maupun Random Effect, yang dilakukan melalui uji Hausman, disajikan dalam Tabel 4.6 berikut ini:

Tabel 4.6 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq.	Chi-Sq.	Prob.
	Statistic	d.f.	
Cross-section random	306.065101	4	0.0000

Sumber : Hasil Olah Data Eviews12

Uji ini bertujuan untuk menentukan model yang lebih tepat antara Fixed Effect dan Random Effect. Berdasarkan hasil uji Hausman, diperoleh nilai probabilitas Cross-Section Random sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0.05 atau alpha 5%. Dengan demikian, H_0 ditolak, sehingga model yang lebih sesuai untuk penelitian ini adalah Fixed Effect Model.

4.3.3 Uji LM (Lagrange Multiplier)

Metode paling efektif untuk menentukan model optimal antara Random Effect dan Common Effect adalah dengan menggunakan uji Lagrange Multiplier. Model Common Effect dianggap yang terbaik jika nilai probabilitas Breusch-Pagan lebih tinggi dari alpha 5%. Sebaliknya, model Random Effect dianggap paling baik jika nilai probabilitasnya lebih rendah dari alpha 5%. Uji LM disajikan dalam tabel 4.7 berikut ini :

Tabel 4.7 Hasil Uji LM(Lagrange Multiplier)

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	165.5629	3.171078	168.7340
	0.0000	-0.1735	0.0000

Sumber : Hasil Olah Data Eviews12

Berdasarkan hasil pengujian di atas, H_a diterima dan H_0 ditolak karena nilai probabilitas Breusch-Pagan sebesar 0,0000 lebih kecil dari α 0,05. Oleh karena itu, model Random Effect adalah yang paling tepat digunakan.

4.4 Interpretasi Model Terbaik

Adapun model yang terbaik digunakan dalam regresi data panel yaitu menggunakan model Fixed Effect Model, dapat ditampilkan pada tabel 4.8 berikut

Tabel 4.8 Regresi Data Panel Model Terbaik : Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	112.1968	21.85320	5.134113	0.0000
X1	-0.038803	0.035141	-1.104194	0.2753
X2	2.69E-06	1.32E-06	2.036206	0.0475
X3	0.113923	0.133240	0.855021	0.397
X4	-1.201745	0.308665	-4.217334	0.0001
R-squared	0.985839			
F-statistic	400.2860			
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Hasil Olah Data Eviews12

4.5 Pengujian Hipotesis

4.5.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen diukur menggunakan Koefisien Determinasi (R^2). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana variabel Pendidikan Lulusan SMA ke Atas, Upah Minimum Kabupaten (UMK), Tingkat Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menjelaskan variasi karakteristik kemiskinan. Berdasarkan hasil regresi model Fixed Effect, diperoleh nilai R^2 sebesar 0.985839 yang menunjukkan bahwa variabel independen, yaitu Rata-rata Lama Sekolah, UMK, Tingkat Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mampu menjelaskan 98.5% variasi variabel dependen, yaitu Tingkat

Kemiskinan. Sementara itu sisanya sebesar 1.5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model ini.

4.5.2 Uji Kelayakan Model (Uji F)

Untuk menilai apakah variabel independen secara keseluruhan mempengaruhi variabel dependen, dilakukan uji kelayakan model. Dengan F-statistik sebesar 400.2860 dan probabilitas sebesar 0.000000, yang lebih kecil dari alpha 0,05. Dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara signifikan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu Penduduk Lulusan SMA ke Atas, UMK, Tingkat Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

4.5.3 Uji Signifikansi Variabel Independen (Uji t)

Uji ini bertujuan berfungsi untuk menentukan sejauh mana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas t-statistik dengan alpha 5%. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari alpha 5%, ini menunjukkan adanya pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih besar dari alpha 5%, berarti tidak ada pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji ini juga dapat dilakukan dengan membandingkan t hitung dan t tabel. Tabel 4.9 menyajikan hasil uji t untuk metode fixed effect. Adapun uji statistik pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Pendidikan

Berdasarkan hasil regresi di atas, koefisien untuk variabel pendidikan adalah negatif sebesar -0.038803 dengan probabilitas 0,2753 lebih besar dari alpha 5%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini variabel pendidikan tidak signifikan secara statistik, yang berarti tingkat pendidikan pada penduduk lulusan SMA ke atas tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)

Berdasarkan hasil regresi yang diperoleh, koefisien variabel Upah Minimum Kabupaten (UMK) adalah positif sebesar 2.69E-06 dengan tingkat probabilitas 0.0475 lebih kecil dari nilai alpha 5%. Hal ini menunjukkan bahwa UMK berpengaruh dan signifikan secara statistik, sehingga dapat disimpulkan bahwa UMK memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Tingkat Pengangguran.

Berdasarkan hasil regresi yang diperoleh, koefisien variabel tingkat pengangguran adalah positif sebesar 0.113923 dengan tingkat probabilitas 0.3970 lebih besar dari nilai alpha 5%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel tingkat pengangguran tidak berpengaruh signifikan secara statistik, yang mengindikasikan bahwa peningkatan tingkat pengangguran tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Berdasarkan hasil regresi yang diperoleh, koefisien variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah negatif sebesar -1.301745 dengan tingkat probabilitas 0.0001, yang lebih kecil dari nilai alpha 5%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel IPM berpengaruh dan signifikan secara statistik, sehingga dapat disimpulkan bahwa IPM memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

4.6 Pembahasan

4.6.1 Pengaruh Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan

Variabel Pendidikan yang diukur dengan presentase penduduk berusia 15 tahun menurut ijazah tertinggi SLTA ke atas, tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dengan koefisien regresi sebesar -0.038803 dan probabilitas 0,2753 lebih besar dari alpha 5%. Dalam penelitian ini, hal tersebut menunjukkan bahwa meningkat atau menurunnya tingkat pendidikan, maka tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan yang dialami.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Natari, (2021) yang menyatakan bahwa pendidikan memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan. Hal dapat terjadi karena individu yang berada pada garis kemiskinan, akan lebih fokus untuk mencukupi kebutuhan pokoknya seperti memnuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Hal ini dapat mengesampingkan kebutuhan lain seperti kebutuhan pendidikan. Pada hakikatnya, pendidikan merupakan investasi masa depan. Apabila seseorang memiliki pendidikan yang tinggi, maka akan membuka peluang untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Selain itu, angka lulusan yang masih rendah, juga mempengaruhi tingkat perekonomian setiap individu.

4.6.2 Pengaruh Upah Minimum Kabupaten terhadap Tingkat Kemiskinan

Variabel Upah Minimum Kabupaten (UMK) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dengan koefisien regresi sebesar $2.69E-06$ dan probabilitas 0,0475 lebih kecil dari alpha 5%. Dalam penelitian ini, hal tersebut menunjukkan bahwa meningkat atau menurunnya UMK, maka dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa UMK terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Yogyakarta selama periode 2013-2023. Secara ekonomi, hasil ini menunjukkan bahwa kenaikan UMK dapat membantu menekan angka kemiskinan, terutama dengan meningkatkan daya beli pekerja berupah rendah. Pengaruh signifikan tersebut dapat dijelaskan oleh kemampuan kenaikan UMK dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga pekerja, sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi kerentanan ekonomi. Selain itu, kebijakan UMK yang diterapkan secara merata di seluruh kabupaten/kota memungkinkan kelompok masyarakat rentan lebih merasakan dampaknya. Namun, untuk memastikan dampak yang lebih luas, kebijakan UMK perlu diimbangi dengan pengendalian biaya hidup serta peningkatan akses terhadap lapangan kerja layak dan pendidikan keterampilan guna mendukung pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Syahrur Romi & Etik Umiyati, 2018) yang menunjukkan bahwa variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota berpengaruh dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

4.6.3 Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan

Variabel Tingkat Pengangguran menunjukkan pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dengan koefisien regresi sebesar 0.113923 dan probabilitas 0,3970 lebih besar dari alpha 5%. Dalam penelitian ini, hal tersebut menunjukkan bahwa meningkat atau menurunnya Tingkat Pengangguran, maka tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Data dari BPS menunjukkan bahwa penduduk SMA umum dan kejuruan, memiliki presentase tingkat pengangguran tertinggi dengan rata-rata lebih dari 7 persen selama periode 2015-2023. Pada tingkat perguruan tinggi diploma memiliki rata-rata presentase tingkat pengangguran sebesar 6.04% dan tingkat sarjana sebesar 5,6%. Tingginya tingkat pengangguran di DIY tidak menunjukkan pengaruh signifikan

terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini dapat terjadi karena pengangguran pada usia muda tidak langsung berhubungan dengan peningkatan kemiskinan, terutama bagi mereka yang masih tinggal bersama orang tua. Dukungan finansial dari orang tua, tetap menjadikan mereka yang belum memiliki pekerjaan tetap atau penghasilan sendiri merasakan hidup yang layak. Orang tua yang memiliki kestabilan finansial dapat memberikan kebutuhan dasar kepada anak-anak mereka yang masih mencari peluang pekerjaan. Meskipun demikian, ketergantungan kepada orang tua dalam jangka panjang dapat mempengaruhi perkembangan dan kemandirian finansial anak muda. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan kemandirian finansial kepada anak muda agar dapat berkontribusi terhadap roda perekonomian secara luas. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Hilmi et al., 2022) yang menunjukkan bahwa tingkat pengangguran tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

4.6.4 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan

Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dengan koefisien regresi sebesar -1.301745 dan probabilitas 0,0001 yang lebih kecil dari alpha 10%. Dalam penelitian ini, hal tersebut menunjukkan bahwa meningkat atau menurunnya IPM, maka dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Tingginya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di DIY menunjukkan pengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Hal ini mencerminkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat secara langsung membantu mengurangi kerentanan ekonomi. Dengan IPM yang tinggi, individu memiliki peluang lebih besar untuk mengakses pekerjaan yang layak, meningkatkan produktivitas, dan memperoleh pendapatan yang lebih stabil. Selain itu, investasi pada pendidikan dan kesehatan yang tercermin dalam IPM tidak hanya meningkatkan kualitas tenaga kerja tetapi juga memperkuat daya saing ekonomi daerah. Namun, meskipun IPM berkontribusi signifikan dalam mengurangi kemiskinan, perlu adanya langkah lanjutan untuk memastikan pemerataan manfaatnya di seluruh wilayah, terutama di daerah dengan akses terbatas terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Kebijakan yang mendukung penguatan infrastruktur dasar dan pemberdayaan

masyarakat menjadi kunci dalam memaksimalkan dampak positif IPM terhadap pengentasan kemiskinan. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Ari Kristin Prasetyoningrum & U. Sulia Sukmawati, 2018) yang menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam analisis simultan, dapat dijelaskan bahwa variabel Pendidikan (Penduduk Lulusan SMA ke Atas) dan Tingkat Pengangguran tidak mempunyai pengaruh terhadap Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan, variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan pengaruh signifikan terhadap Kemiskinan.
2. Tingkat pendidikan yang dihitung melalui data penduduk lulusan SMA ke atas tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Artinya, dalam penelitian ini peningkatan penduduk lulusan SMA ke atas tidak berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan. Hal ini disebabkan karena penduduk yang hidup dengan garis kemiskinan lebih memfokuskan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dibanding kebutuhan lain seperti pendidikan.
3. Upah Minimum Kabupaten/Kota berpengaruh terhadap kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini, kenaikan dan penurunan UMK berpengaruh terhadap kenaikan atau penurunan Kemiskinan.
4. Tingkat Pengangguran tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pengangguran tidak berpotensi menaikkan kemiskinan dan penurunan pengangguran berpotensi menurunkan kemiskinan. Hal ini dapat disebabkan karena penduduk usia muda seperti penduduk lulusan perguruan tinggi yang belum mendapatkan pekerjaan, masih didukung dengan finansial orang tua. Artinya, mereka yang belum mendapatkan pekerjaan masih dapat merasakan hidup layak dengan kestabilan finansial yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

5. Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap kemiskinan yang menunjukkan bahwa dalam penelitian ini, kenaikan dan penurunan IPM berpengaruh terhadap kenaikan atau penurunan Kemiskinan.

5.2 Implikasi

Berdasarkan simpulan di atas, dapat diperoleh implikasi sebagai berikut :

1. Perlu adanya kebijakan dan fokus pemerintah terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat yang belum tersentuh pendidikan dapat merasakan pendidikan dengan adanya kebijakan yang meringankan beban masyarakat miskin seperti bantuan sosial, beasiswa pendidikan yang tepat sasaran, dan juga perbaikan infrastruktur akses pendidikan
2. Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap kemiskinan menunjukkan peran penting dalam meningkatkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk dampak yang maksimal, kebijakan tersebut perlu disertai langkah strategis lain, seperti peningkatan lapangan kerja dan pengendalian biaya hidup untuk mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan.
3. Tingkat pengangguran tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan, hal ini dapat disebabkan karena adanya faktor-faktor lain yang lebih dominan dalam mempengaruhi kemiskinan. Pemerintah dapat menyusun kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi kerja dengan meningkatkan kualitas serta jumlah lapangan kerja, menciptakan peluang kerja lebih luas pada sektor-sektor strategis seperti pariwisata ekonomi kreatif, dan teknologi. Pemerintah juga dapat memberikan program pendanaan khusus untuk kewirausahaan, juga pelatihan dan pengembangan untuk mendukung anak muda yang tertarik dengan bisnis untuk membuka lapangan pekerjaan. Selain itu, penduduk muda juga harus memaksimalkan pelatihan atau sertifikasi agar lebih membuka peluang untuk mendapatkan pekerjaan. Di sisi lain, peran orang tua dalam melatih kemandirian finansial pada anak juga diperlukan untuk berkontribusi pada roda perekonomian.
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh terhadap kemiskinan, hal ini sangat penting karena IPM mencerminkan perbaikan dalam pendidikan, kesehatan, dan standar hidup, yang pada gilirannya membantu mengurangi kemiskinan. Untuk mencapai dampak yang optimal, peningkatan IPM perlu

didukung oleh kebijakan yang memperluas akses lapangan kerja, kemudahan masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan keehatan, serta pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam secara maksimal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifah, K., & Imaningsih, N. (2023). Tingkat Pendidikan, Upah Minimum, & Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Equilibrium*, 12(1).
- Andykha, R., Handayani, H. R., & Woyanti, N. (2018). Analisis Pengaruh Pdrb, Tingkat Pengangguran, Dan Ipm Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 33(2), 113–123.
- Ari Kristin Prasetyoningrum, & U. Sulia Sukmawati. (2018). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 217–240.
- Aria Bhaswara Mohammad Bintang, & Nenik Woyanti. (2018). Pengaruh Pdrb, Pendidikan, Kesehatan, Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah (2011-2015). *Media Ekonomi Dan Manajemen*.
- Badan Pusat Statistik. (2021a). *Kemiskinan Makro Indonesia*.
- Badan Pusat Statistik. (2021b). Kemiskinan Makro Indonesia. *Badan Pusat Statistika (BPS)*.
- Badan Pusat Statistik. (2023a). *Profil Kemiskinan Provinsi Jawa Timur 2023*.
- Badan Pusat Statistik. (2023b). *Statistik Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta 2023*.
- Badan Pusat Statistik. (2024a). Data Dan Informasi Kemiskinan Jawa TENGAH 2019-2023. *Badan Pusat Statistik*.
- Badan Pusat Statistik. (2024b, July 1). *Profil Kemiskinan D.I. Yogyakarta Maret 2024*. <https://Yogyakarta.Bps.Go.Id/Id/Pressrelease/2024/07/01/1587/Profil-Kemiskinan-d-i--Yogyakarta-Maret-2024.Html>.
- Badan Pusat Statistik. (2024c, September 17). *Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota*. <https://Yogyakarta.Bps.Go.Id/Id/Statistics->

Table/2/MTM0IzI=/Jumlah-Penduduk-Miskin-Menurut-Kabupaten-Kota.Html.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Statistik Pendidikan 2023*.

Choir, Z., & Hapsari, M. T. (2023). Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Pendidikan Dan Belanja Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Gerbangkertasila Tahun 2015-2022. *Jurnal Mirai Management*, 8(2), 94–105.

Dian Nugraha, F., & Indira Hasmarini, M. (2024). Faktor-Faktor Ekonomi yang Mempengaruhi Kemiskinan di Yogyakarta: Studi Indeks Gini, UMK, IPM, dan Pengangguran (2019-2023). *YUME : Journal of Management*, 7(2), 807–816.

Durrotul Mahsunah. (2011a). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur. *Universitas Negeri Surabaya*.

Durrotul Mahsunah. (2011b). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur. *Jurnal Unesa*.

Faritz, M. N., & soejoto, ady. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah. *Universitas Negeri Surabaya*.

Hilmi, Moh. Nasir Hasan Dg. Marumu, Ramlawati, & Cytra Dewi Peuru. (2022). Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Tolitoli. *Growth: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*.

Khoirus, M., Program, S., Pembangunan, S. E., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2021). Pengaruh Upah Minimum Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Timur. *Gemah Ripah Jurnal Bisnis*.

Mukaromah, L., Hanifatuzzahra, Z., Nasrullah, A., Latifah, T. M., Purwaningsih, V. T., & Suparta, I. W. (2023). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Upah Minimum, Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2022. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Flores*, 13(2), 228–245. <https://doi.org/10.37478/als.v13i2.2874>

- Radityana, I. D. G. M., Djayastra, I. K., Danendra, A. A. N. B., Murthi, N. W., Universitas, F. E., & Korespondensi, T. (2023). Pengaruh Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran Terbuka terhadap Jumlah Kemiskinan di Provinsi Bali. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Manajemen*, 1.
- Sari, Y. A. (2021). Pengaruh Upah Minimum Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Equilibrium*, 10(2).
- sholihin, M. khoirus. (2021). Pengaruh Upah Minimum Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Timur. *Gemah Ripah Jurnal Bisnis*.
- Syahrur Romi, & Etik Umiyati. (2018). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan upah minimum terhadap kemiskinan di Kota Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 7(1), 2303–1255.
- Wahyudi, D., & Rejekingsih, T. W. (2013). Analisis Kemiskinan Di Jawa Tengah. In *Diponegoro Journal Of Economics* (Vol. 2, Issue 1).

LAMPIRAN

Lampiran

Data Kemiskinan, Penduduk Lulusan SMA ke Atas, Upah Minimum Kabupaten/Kota, Jumlah Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia

Kabupaten / Kota	year	Kemiskinan	Pendidikan	Upah Minimum	Pengangguran	IPM
Kulonprogo	2013	21,39	29,4	954.339,00	2,85	70,14
Kulonprogo	2014	20,64	37,07	1.069.000,00	2,88	70,68
Kulonprogo	2015	20,3	39,1	1.138.000,00	3,72	71,52
Kulonprogo	2016	20,3	39,03	1.268.870,00	2,85	72,38
Kulonprogo	2017	20,03	40,37	1.373.600,00	1,99	73,23
Kulonprogo	2018	18,3	39,82	1.493.250,00	1,49	73,76
Kulonprogo	2019	17,39	38,57	1.613.200,00	1,8	74,44
Kulonprogo	2020	18,01	46,94	1.750.500,00	3,71	74,46
Kulonprogo	2021	18,38	44,72	1.770.000,00	3,69	74,71
Kulonprogo	2022	16,39	44,84	1.904.275,00	2,8	75,46
Kulonprogo	2023	15,64	44,85	2.050.447,00	2,4	75,82
Bantul	2013	16,48	38,92	993.484,00	3,36	76,78
Bantul	2014	15,89	43,35	1.125.500,00	2,57	77,11
Bantul	2015	14,55	47,55	1.163.800,00	3	77,99
Bantul	2016	14,55	41,2	1.297.700,00	3,06	78,42
Bantul	2017	14,07	47,7	1.404.760,00	3,12	78,67
Bantul	2018	13,43	49,26	1.572.150,00	2,72	79,45
Bantul	2019	12,94	51,72	1.649.800,00	3,06	80,01
Bantul	2020	13,5	50,18	1.790.500,00	4,06	80,01
Bantul	2021	14,04	52,48	1.805.000,00	4,04	80,28

Bantul	2022	12,27	50,14	1.916.848,00	3,97	80,69
Bantul	2023	11,95	51,83	2.066.439,00	3,78	81,74
Gunungkidul	2013	21,7	16,09	947.114,00	1,69	66,31
Gunungkidul	2014	20,83	19,5	988.500,00	1,61	67,03
Gunungkidul	2015	19,34	18,65	1.108.249,00	2,9	67,41
Gunungkidul	2016	19,34	23,11	1.235.700,00	2,75	67,82
Gunungkidul	2017	18,65	25,74	1.337.650,00	1,65	68,73
Gunungkidul	2018	17,12	25,67	1.454.200,00	2,07	69,24
Gunungkidul	2019	16,61	25,59	1.571.000,00	1,92	69,96
Gunungkidul	2020	17,07	28,8	1.705.000,00	2,16	69,98
Gunungkidul	2021	17,69	26,22	1.842.460,00	2,2	70,16
Gunungkidul	2022	15,86	27,49	1.900.000,00	2,08	70,96
Gunungkidul	2023	15,6	25,98	2.049.266,00	2,09	71,46
Sleman	2013	9,68	49,65	1.026.181,00	3,28	80,26
Sleman	2014	9,5	61,67	1.127.000,00	4,21	80,73
Sleman	2015	8,21	59,81	1.200.000,00	5,37	81,2
Sleman	2016	8,21	58,42	1.338.000,00	4,44	82,15
Sleman	2017	8,13	58,11	1.448.385,00	3,51	82,85
Sleman	2018	7,65	59,37	1.574.550,00	4,4	83,42
Sleman	2019	7,41	60,04	1.701.000,00	3,93	83,85
Sleman	2020	8,12	64,65	1.846.000,00	5,09	83,94
Sleman	2021	8,64	63,56	1.903.500,00	5,17	84
Sleman	2022	7,74	61,68	2.001.000,00	4,78	84,31
Sleman	2023	7,52	62,74	2.159.519,00	4,47	84,86
Kota Yogyakarta	2013	8,82	56,52	1.065.247,00	6,45	83,61
Kota Yogyakarta	2014	8,67	66,11	1.173.300,00	6,35	83,78
Kota Yogyakarta	2015	7,7	67,17	1.302.500,00	5,52	84,56

Kota Yogyakarta	2016	7,7	60,21	1.452.400,00	5,3	85,32
Kota Yogyakarta	2017	7,64	64,08	1.572.200,00	5,08	85,49
Kota Yogyakarta	2018	6,98	65,21	1.709.150,00	6,22	86,11
Kota Yogyakarta	2019	6,84	63,02	1.848.400,00	4,8	86,65
Kota Yogyakarta	2020	7,27	66,58	2.004.000,00	9,16	86,61
Kota Yogyakarta	2021	7,69	68,02	2.069.530,00	9,13	87,18
Kota Yogyakarta	2022	6,62	64,99	2.153.970,00	7,18	87,69
Kota Yogyakarta	2023	6,49	66,64	2.324.776,00	6,07	88,61

Lampiran 1

1. Common Effect Model

Dependent Variable: KEMISKINAN
Method: Panel Least Squares
Date: 02/14/25 Time: 10:06
Sample: 2013 2023
Periods included: 11
Cross-sections included: 5
Total panel (balanced) observations: 55

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	81.80656	9.082916	9.006640	0.0000
PENDIDIKAN	0.096245	0.064433	1.493728	0.1415
UPAH MINIMUM	6.12E-08	7.01E-07	0.087373	0.9307
PENGANGGURAN	-0.093734	0.231096	-0.405604	0.6868
IPM	-0.931924	0.156985	-5.936399	0.0000
R-squared	0.891615	Mean dependent var	13.33600	
Adjusted R-squared	0.882944	S.D. dependent var	5.006495	
S.E. of regression	1.712892	Akaike info criterion	4.000751	
Sum squared resid	146.6999	Schwarz criterion	4.183236	
Log likelihood	-105.0207	Hannan-Quinn criter.	4.071319	
F-statistic	102.8298	Durbin-Watson stat	0.178711	
Prob(F-statistic)	0.000000			

2. Fixed Effect Model

Dependent Variable: KEMISKINAN

Method: Panel Least Squares

Date: 02/14/25 Time: 10:07

Sample: 2013 2023

Periods included: 11

Cross-sections included: 5

Total panel (balanced) observations: 55

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	112.1968	21.85320	5.134113	0.0000
PENDIDIKAN	-0.038803	0.035141	-1.104194	0.2753
UPAH MINIMUM	2.69E-06	1.32E-06	2.036206	0.0475
PENGANGGURAN	0.113923	0.133240	0.855021	0.3970
IPM	-1.301745	0.308665	-4.217334	0.0001

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.985839	Mean dependent var	13.33600
Adjusted R-squared	0.983376	S.D. dependent var	5.006495
S.E. of regression	0.645511	Akaike info criterion	2.111031
Sum squared resid	19.16747	Schwarz criterion	2.439504
Log likelihood	-49.05335	Hannan-Quinn criter.	2.238054
F-statistic	400.2860	Durbin-Watson stat	1.208854
Prob(F-statistic)	0.000000		

3. Random Effect Model

Dependent Variable: KEMISKINAN
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 02/14/25 Time: 10:20
Sample: 2013 2023
Periods included: 11
Cross-sections included: 5
Total panel (balanced) observations: 55
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	81.80656	3.422936	23.89953	0.0000
PENDIDIKAN	0.096245	0.024282	3.963675	0.0002
UPAH MINIMUM	6.12E-08	2.64E-07	0.231848	0.8176
PENGANGGURAN	-0.093733	0.087090	-1.076288	0.2870
IPM	-0.931924	0.059160	-15.75250	0.0000

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		3.58E-05	0.0000
Idiosyncratic random		0.645511	1.0000

Weighted Statistics			
R-squared	0.891615	Mean dependent var	13.33600
Adjusted R-squared	0.882944	S.D. dependent var	5.006495
S.E. of regression	1.712892	Sum squared resid	146.6999
F-statistic	102.8298	Durbin-Watson stat	0.178711
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.891615	Mean dependent var	13.33600
Sum squared resid	146.6999	Durbin-Watson stat	0.178711

Lampiran 2

1. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: FEM
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	76.516278	(4,46)	0.0000
Cross-section Chi-square	111.934610	4	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: KEMISKINAN
Method: Panel Least Squares
Date: 02/14/25 Time: 10:16
Sample: 2013 2023
Periods included: 11
Cross-sections included: 5
Total panel (balanced) observations: 55

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	81.80656	9.082916	9.006640	0.0000
PENDIDIKAN	0.096245	0.064433	1.493728	0.1415
UPAH MINIMUM	6.12E-08	7.01E-07	0.087373	0.9307
PENGANGGURAN	-0.093734	0.231096	-0.405604	0.6868
IPM	-0.931924	0.156985	-5.936399	0.0000
R-squared	0.891615	Mean dependent var	13.33600	
Adjusted R-squared	0.882944	S.D. dependent var	5.006495	
S.E. of regression	1.712892	Akaike info criterion	4.000751	
Sum squared resid	146.6999	Schwarz criterion	4.183236	
Log likelihood	-105.0207	Hannan-Quinn criter.	4.071319	
F-statistic	102.8298	Durbin-Watson stat	0.178711	
Prob(F-statistic)	0.000000			

2. Uji LM

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	165.5629 (0.0000)	3.171078 (0.0750)	168.7340 (0.0000)
Honda	12.86712 (0.0000)	-1.780752 (0.9625)	7.839249 (0.0000)
King-Wu	12.86712 (0.0000)	-1.780752 (0.9625)	9.922853 (0.0000)
Standardized Honda	21.40680 (0.0000)	-1.464444 (0.9285)	7.282593 (0.0000)
Standardized King-Wu	21.40680 (0.0000)	-1.464444 (0.9285)	11.19651 (0.0000)
Gourieroux, et al.	--	--	165.5629 (0.0000)

3. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: RE

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	306.065101	4	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
PENDIDIKAN	-0.038803	0.096245	0.000645	0.0000
UPAH MINIMUM	0.000003	0.000000	0.000000	0.0423
PENGANGGURAN	0.113923	-0.093733	0.010168	0.0395
IPM	-1.301745	-0.931924	0.091774	0.2222

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: KEMISKINAN

Method: Panel Least Squares

Date: 02/14/25 Time: 10:21

Sample: 2013 2023

Periods included: 11

Cross-sections included: 5

Total panel (balanced) observations: 55

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	112.1968	21.85320	5.134113	0.0000
PENDIDIKAN	-0.038803	0.035141	-1.104194	0.2753
UPAH MINIMUM	2.69E-06	1.32E-06	2.036206	0.0475
PENGANGGURAN	0.113923	0.133240	0.855021	0.3970
IPM	-1.301745	0.308665	-4.217334	0.0001

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.985839	Mean dependent var	13.33600
Adjusted R-squared	0.983376	S.D. dependent var	5.006495
S.E. of regression	0.645511	Akaike info criterion	2.111031
Sum squared resid	19.16747	Schwarz criterion	2.439504
Log likelihood	-49.05335	Hannan-Quinn criter.	2.238054
F-statistic	400.2860	Durbin-Watson stat	1.208854
Prob(F-statistic)	0.000000		